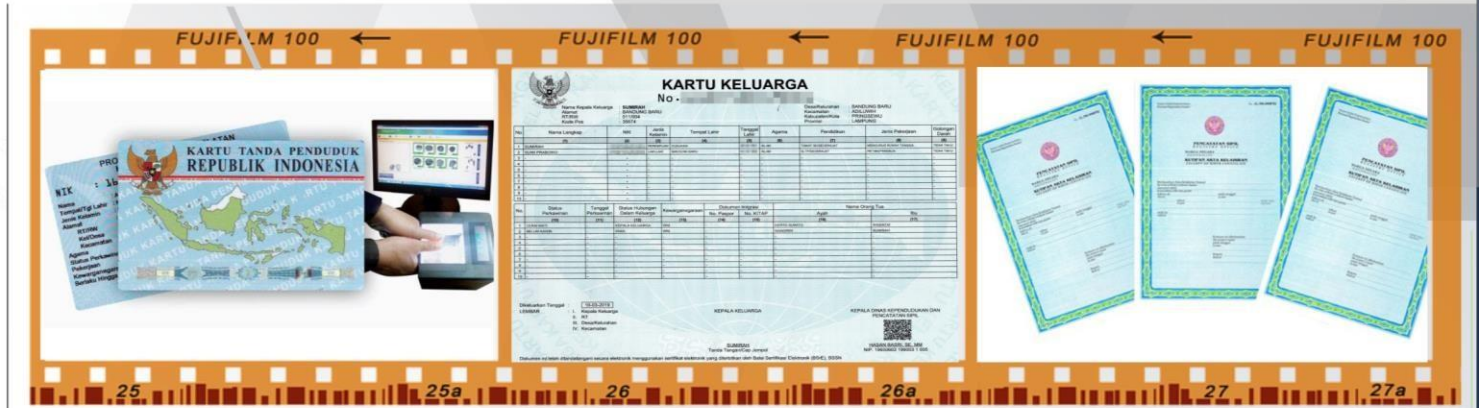


# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BONE**

*Jalan. H. A. Mappanyukki Watampone*



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 - 2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
6. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8. Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
9. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

12. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
16. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

## BAB II

### UMUM

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah menjabarkan RPD tahun 2024-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah untuk periode waktu 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah:

- a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPD Tahun 2024-2026;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu) tahun.

## BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN

### Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.

### Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.

- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati/Pj. Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Pj. Bupati melalui Kepala Bappeda.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

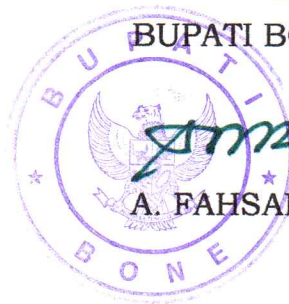
BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone,  
Pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI BONE



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di watampone

Pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 61

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahuwa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 merupakan dokumen induk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 ini. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Watampone, 19 Mei 2023



**H. A. SAHARUDDIN, S.STP, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19791206 200012 1 006

DAFTAR ISI

|                                                                                                                | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGATAR .....                                                                                            | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                                               | ii      |
| DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....                                                                                  | iv      |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                                        | 1       |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                       | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                                                       | 4       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                                    | 6       |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                                                                | 7       |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....                                                                | 9       |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                        | 9       |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                                                  | 22      |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                                            | 35      |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                                     | 44      |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....                 | 44      |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....                                              | 48      |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....                                     | 48      |
| 3.2 Telaahan terhadap Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 ..... | 49      |
| 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....                            | 64      |
| 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis .....                                                                          | 66      |

|            |             |                                                                                                  |            |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB</b> | <b>IV</b>   | <b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>                                                                  | <b>67</b>  |
|            | 4.1         | Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil .....                              | 67         |
|            | 4.2         | Cascading Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil .....                                       | 70         |
| <b>BAB</b> | <b>V</b>    | <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                                         | <b>97</b>  |
|            | 5.1         | Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan<br>Sipil .....                                        | 97         |
|            | 5.2         | Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil .....                                  | 97         |
| <b>BAB</b> | <b>VI</b>   | <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA<br/>PENDANAAN .....</b>                                    | <b>100</b> |
|            | 6.1         | Rencana Program dan Kegiatan serta<br>Pendanaan Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil ..... | 100        |
| <b>BAB</b> | <b>VII</b>  | <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG<br/>URUSAN .....</b>                                           | <b>136</b> |
| <b>BAB</b> | <b>VIII</b> | <b>PENUTUP .....</b>                                                                             | <b>138</b> |

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

|                                                                                                                                                                               | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 1 Bagan Alir Tahapan & Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....                                                                                             | 3       |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone .....                                                                                           | 10      |
| Gambar 3 Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone .....                                                                                                     | 71      |
| Tabel 1 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone .....                                                                                         | 23      |
| Tabel 2 Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone Berdasarkan Jabatan dan Eselon .....                                                                      | 23      |
| Tabel 3 Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....                                                                    | 24      |
| Tabel 4 Jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone berdasarkan Pendidikan .....                                                                              | 25      |
| Tabel 5 Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone .....                                                                                           | 28      |
| Tabel 6 Kebutuhan Pengadaan & Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone .....                                                               | 33      |
| Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 .....                                                                                                   | 37      |
| Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 .....                                                                                     | 41      |
| Tabel 9 Identifikasi Permasalahan sesuai Tugas & Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone .....                                                                | 48      |
| Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 .....                                                                                     | 50      |
| Tabel 11 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2024-2026) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone .....                                                          | 69      |
| Tabel 12 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone .....                                                                       | 98      |
| Tabel 13 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone ( Tahun 2024-2026) .....                                                   | 102     |
| Tabel 14 Indikator Kinerja Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 ..... | 136     |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dinamika perencanaan sampai pada tahun ketiga implementasi RPJMD membawa konsekuensi penyesuaian substansi RPJMD. Berdasarkan Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Salah satu perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud huruf c, adalah perubahan kebijakan nasional, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020** tentang **Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah**. Kepmendagri ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 dan Lampiran huruf A angka 4 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Kepmendagri ini menetapkan hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, maka diperlukan rencana strategis (renstra) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah untuk setiap periode 5 (lima) tahun masa kepemimpinan kepala daerah terpilih. Renstra perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk target kinerja setiap tahunnya dalam jangka waktu periode lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih.

Renstra perangkat daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, dengan memperhatikan waktu pelantikan kepala daerah terpilih. Penyusunannya berjalan simultan dengan penyusunan RPJMD (yang diproses dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom up, dengan substansi pendekatan yang bersifat holistik-tematik, integratif, dan spasial).

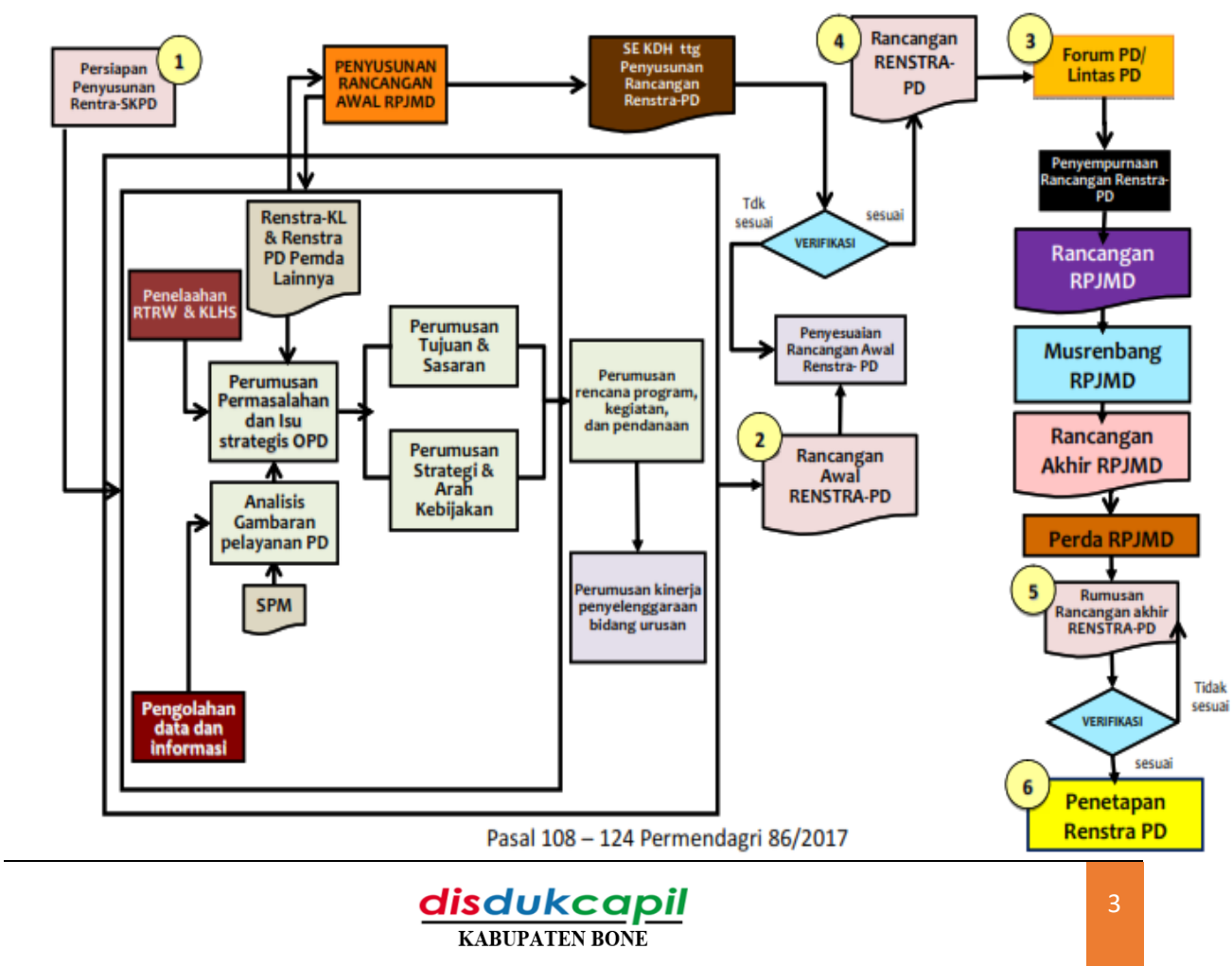
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal yang kemudian menjadi rancangan Renstra Perangkat Daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah (***secara lengkap pada Gambar 1***).

Pada tahap persiapan dilakukan pembentukan tim penyusun, orientasi dan agenda kerja tim serta penyiapan dan informasi pembangunan daerah sesuai urusan perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal dengan mengidentifikasi isu-isu strategis terkait penyelenggaraan kinerja perangkat daerah beserta analisis dan evaluasi

terhadap realisasi capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada periode lima tahun sebelumnya, termasuk kajian/telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang terkait. Setelah itu, ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan hingga kerangka pendanaannya. Rancangan renstra ini kemudian dibahas dalam Forum Perangkat Daerah untuk penyempurnaan yang pada akhirnya termuat secara keseluruhan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Setelah melalui proses verifikasi oleh BAPPEDA dan finalisasi rancangan akhir, selanjutnya renstra perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Penetapan RPJMD melalui Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah atas persetujuan bersama dengan DPRD. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman dan instrumen dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
13. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
20. Perubahan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone ( Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 27);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah memberikan pedoman bagi arah pencapaian target kinerja organisasi yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun, yang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru serta dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah agar dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap arah pengembangan kebijakan, program dan kegiatan prioritas selama 3 (tiga) tahun sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran,

program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

#### 1.4 Sistematika Penulisan Renstra

Dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra, serta sistematika penulisan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bone, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan di bidang kependudukan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

**BAB III Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**, merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Tahun 2018-2023, dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, juga menentukan isu-isu strategis.

**BAB IV Tujuan Dan Sasaran**, menjelaskan Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun Renstra yakni Tahun 2026.

**BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan**, berisikan uraian mengenai Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan.

**BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**, berisikan uraian mengenai Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan hingga 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** menjelaskan tentang Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII Penutup,** memuat pedoman transisi dan kaidah-kaidah di dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2024 – 2026.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

### A. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone mempunyai **tugas** *membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.*

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone menyelenggarakan fungsi :

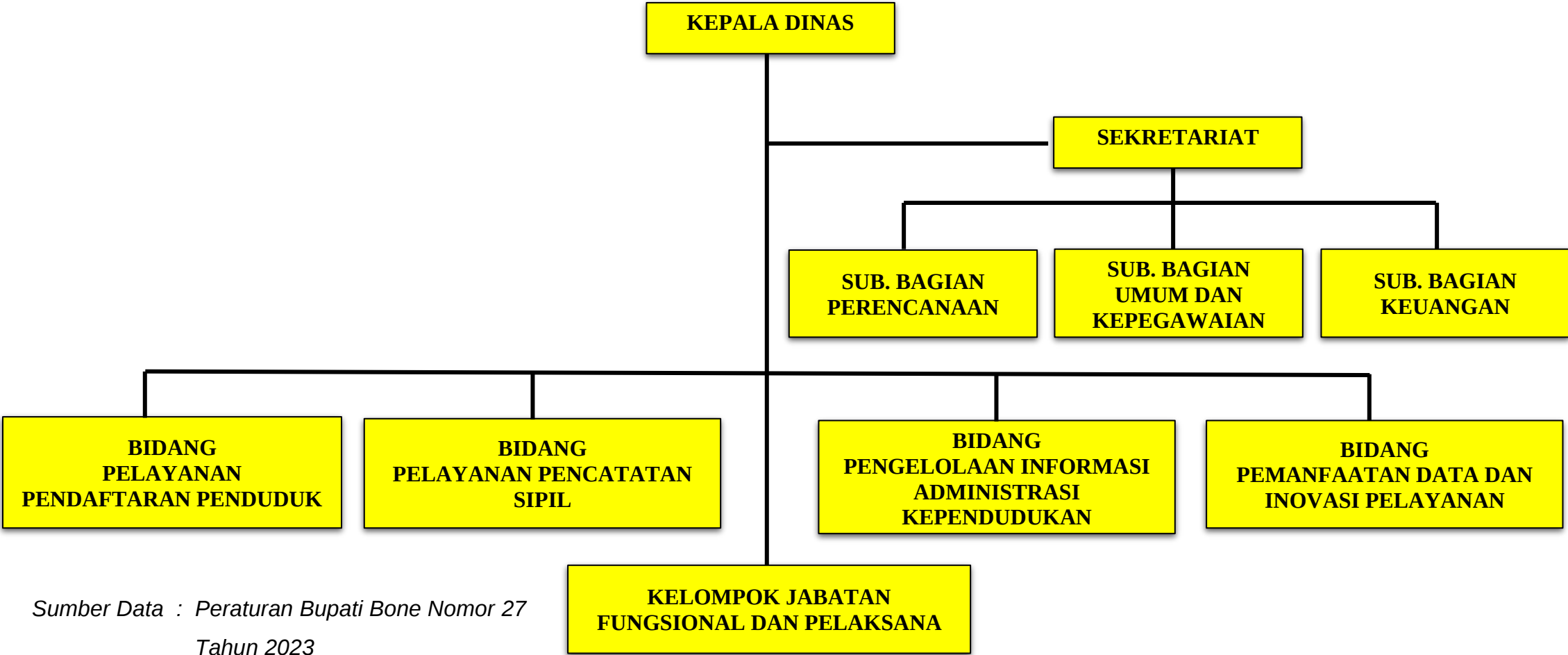
- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### B. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas diperlukan sumber daya manusia/aparatur yang berkualitas dan professional dalam bidangnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dapat di lihat pada ***gambar*** di bawah ini.

Gambar 2.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE



Sumber Data : Peraturan Bupati Bone Nomor 27  
Tahun 2023

## C. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional

### Kepala Dinas

#### *Tugas Pokok :*

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

#### *Fungsi :*

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan Pemerintahan bidang administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### *Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 8) Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil;
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 10) menyelenggarakan kerja sama administrasi kependudukan;
- 11) Menyelenggarakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 12) Menyelenggarakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- 13) Membina, mengkoordinir, mengendalikan bidang administrasi kependudukan;
- 14) Menyelenggarakan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
- 15) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- 16) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 1. Sekretaris

### *Tugas Pokok :*

Koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.

### *Fungsi :*

- 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- 3) Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- 4) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### *Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- 7) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- 9) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 10) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- 11) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 12) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 13) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 15) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 16) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan masing-masing rincian tugas, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kepala Sub Bagian Perencanaan**

*Tugas Pokok :*

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

*Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 7) Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- 8) Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- 9) Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- 10) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 11) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 13) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

*Tugas Pokok :*

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

*Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- 7) Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- 8) Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- 9) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 10) Menyiapkan bahan dan Menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta Menyusun laporan barang inventaris;
- 12) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- 13) Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 14) Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan, dan keprotokolan;
- 15) Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai;
- 16) Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- 17) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- 18) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- 19) Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Dinas;
- 20) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 21) Menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- 22) Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

- 23) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 24) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 25) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 26) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### 3. Kepala Sub Bagian Keuangan

*Tugas Pokok :*

Membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

*Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
- 7) Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
- 8) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- 9) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- 10) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- 11) Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- 13) Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;

- 14) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 15) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

### *Tugas Pokok :*

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

### *Fungsi :*

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### *Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

- 9) Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 10) Melaksanakan penertiban dokumen pendaftaran penduduk;
- 11) Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- 12) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
- 13) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 14) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### 3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

#### *Tugas Pokok :*

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil.

#### *Fungsi :*

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

#### *Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- 9) Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil;
- 10) Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- 11) Melaksanakan pendokumentasian hasil
- 12) Pelayanan pencatatan sipil;
- 13) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
- 14) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 15) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

*Tugas Pokok :*

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

*Fungsi :*

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

*Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun perencanaan pengelolaan;
- 7) Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 9) Melaksanakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- 10) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 11) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 12) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

### *Tugas Pokok :*

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

### *Fungsi :*

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai Bidang tugasnya.

### *Uraian Tugas :*

- 1) Menyusun rencana kegiatan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- 5) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Menyusun perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- 9) Melaksanakan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 10) Melaksanakan kerjasama administrasi kependudukan;
- 11) Melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 12) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 13) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 14) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## 6. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

*Tugas Pokok :*

Melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### A. Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resource) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023.

Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tahun 2023 seluruhnya sebanyak 75 orang yang terdiri dari 32 Laki-laki dan 43 Orang Perempuan. Dari seluruh pegawai yang ada memenuhi kualifikasi keahlian teknis sebagaimana Komposisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditunjukkan pada data berikut :

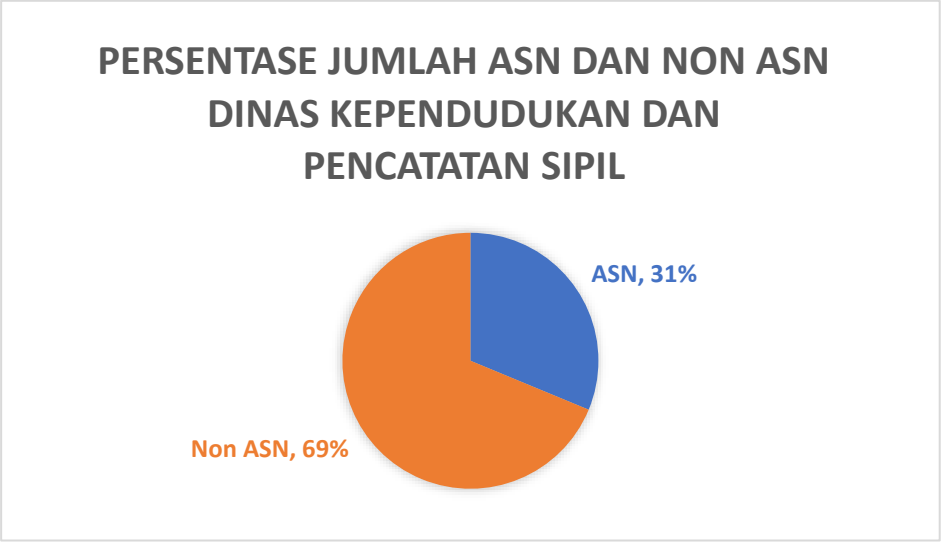
❖ Jumlah Pegawai

Tabel 1

Jumlah ASN dan Non ASN  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No     | Pegawai | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|---------|-----------|-----------|--------|
| 1      | ASN     | 10        | 17        | 27     |
| 2      | Non ASN | 22        | 26        | 48     |
| Jumlah |         | 32        | 43        | 75     |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.  
Bone Tahun 2023



❖ Data Jabatan

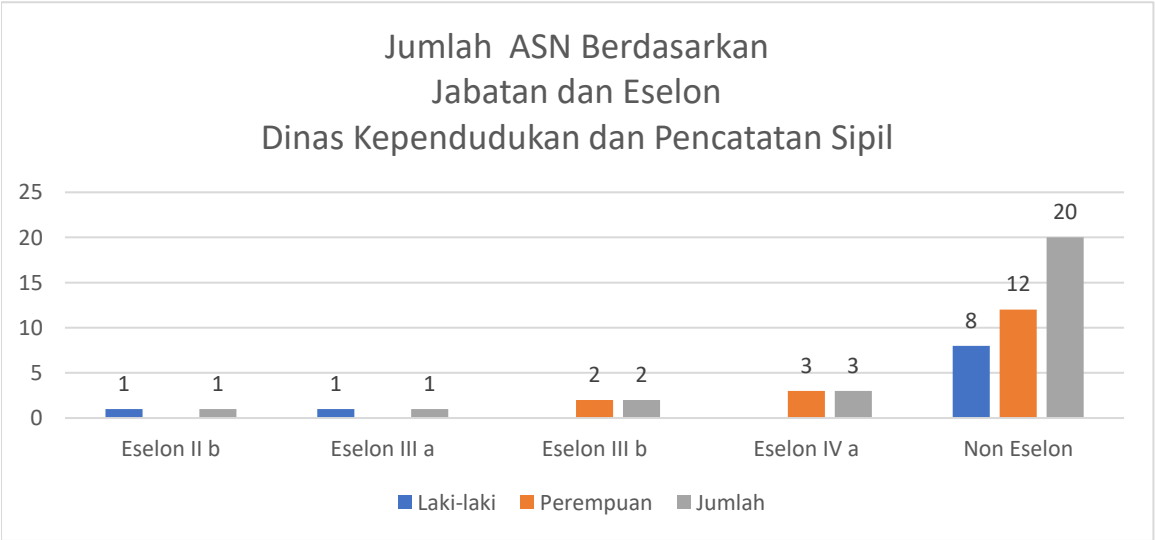
Tabel 2

Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan dan Eselon  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Jabatan                         | Eselon | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Kepala Dinas                    | II b   | 1         | -         | 1      |
| 2. | Sekretaris                      | III a  | 1         | -         | 1      |
| 3. | Kepala Bidang                   | III b  | -         | 2         | 2      |
| 4. | Kasubag<br>Perencanaan          | IV a   | -         | 1         | 1      |
| 5. | Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian | IV a   | -         | 1         | 1      |
| 6. | Kasubag Keuangan                | IV a   | -         | 1         | 1      |
| 7. | Analisis Kebijakan              | -      | 4         | 6         | 10     |
| 8. | Analisis Data dan<br>Informasi  | -      | -         | 2         | 2      |

| No     | Jabatan                                              | Eselon | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------|
| 9.     | Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | -      | 2         | -         | 2      |
| 10.    | Pengelola Daftar Gaji                                | -      | -         | 1         | 1      |
| 11.    | Pengadministrasi Kependudukan                        | -      | -         | 2         | 2      |
| 12.    | Pengadministrasi Kelahiran                           | -      | -         | 1         | 1      |
| 13.    | Pranata Komputer Terampil                            | -      | 2         | -         | 2      |
| Jumlah |                                                      |        | 10        | 17        | 27     |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Tahun 2023



❖ Data Kepangkatan dan Golongan

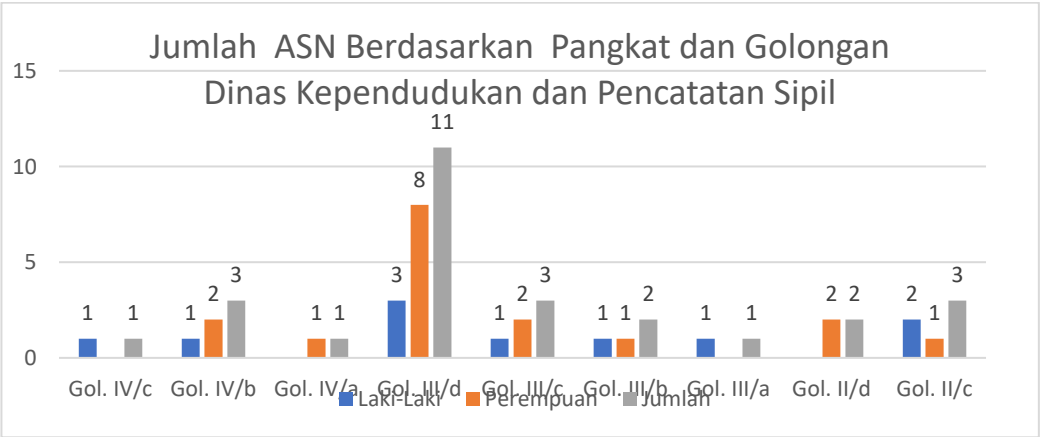
Tabel 3

Jumlah ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No | Pangkat               | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 1. | Pembina Utama Muda    | IV/c     | 1         | -         | 1      |
| 2. | Pembina Tingkat I     | IV/b     | 1         | 2         | 3      |
| 3. | Pembina               | IV/a     | -         | 1         | 1      |
| 4. | Penata Tingkat I      | III/d    | 3         | 8         | 11     |
| 5. | Penata                | III/c    | 1         | 2         | 3      |
| 6. | Penata Muda Tingkat I | III/b    | 1         | 1         | 2      |
| 7. | Penata Muda           | III/a    | 1         | -         | 1      |

| No     | Pangkat               | Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|--------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 8.     | Pengatur Tingkat I    | II/d     | -         | 2         | 2      |
| 9.     | Pengatur              | II/c     | 2         | 1         | 3      |
| 10.    | Pengatur Muda Tingkat | II/b     | -         | -         | -      |
| 11.    | Pengatur Muda         | II/a     | -         | -         | -      |
| 12.    | Juru Tingkat I        | I/d      | -         | -         | -      |
| 13.    | Juru                  | I/c      | -         | -         | -      |
| Jumlah |                       |          | 10        | 17        | 27     |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Tahun 2023



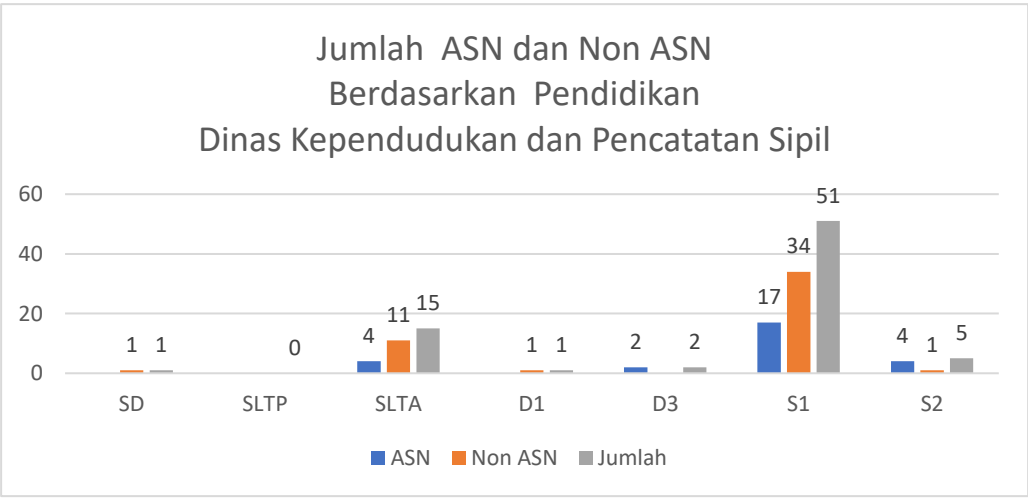
❖ Pendidikan Umum

Tabel 4

Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Pendidikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No     | Pendidikan | ASN       |           | Non ASN   |           |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |            | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| 1      | SD         | -         | -         | 1         | -         |
| 2      | SLTP       | -         | -         | -         | -         |
| 3      | SLTA       | -         | 4         | 5         | 6         |
| 4      | D1         | -         | -         | 1         | -         |
| 5      | D3         | 2         | -         | -         | -         |
| 6      | S1         | 6         | 11        | 14        | 20        |
| 7      | S2         | 2         | 2         | 1         | -         |
| Jumlah |            | 10        | 17        | 22        | 26        |

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone Tahun 2023



Secara umum, dari grafik dan tabel tersebut diatas, tergambar bahwa secara kuantitatif, sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone belum sepenuhnya memadai jika dibandingkan kebutuhan organisasi dengan mengacu pada pengisian jabatan yang ada dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, pemerataan jabatan belum ideal berdasarkan formasi kebutuhan pegawai yang ditetapkan dalam peta jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, khususnya pada pengisian jabatan fungsional dan jabatan administrasi pelaksana.

Kedepannya, diperlukan perekrutan pegawai baru untuk mengisi jabatan administrasi (administratur, pengawas, dan pelaksana) yang masih lowong sesuai formasi kebutuhan. Hal ini dapat diupayakan melalui pengadaan CPNS, mutasi jabatan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kualitas SDM, masih diperlukan peningkatan dan pengembangan secara berkelanjutan atas kompetensi dan profesionalisme Aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Secara lengkap, kebutuhan dan kondisi ketersediaan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone tergambar dalam Peta Jabatan dan Analisis Jabatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone.

**B. Sumber Daya Aset/Sarana dan Prasarana**

Aset merupakan sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone yang dimanfaatkan untuk mendukung/menunjang pelaksanaan kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone.

Sarana gedung kantor yang dipergunakan saat ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aset Sekretariat Daerah yang berlokasi pada Kantor Bupati Bone bersama beberapa OPD yang merupakan lembaga teknis daerah. Selain itu terdapat pula sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan dan perlengkapan kantor beserta meubeleur kantor, yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung wifi internet, termasuk sejumlah kendaraan dinas/operasional berupa mobil dan sepeda motor yang sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone.

Secara umum, berdasarkan daftar inventaris aset/barang, kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone hingga Tahun 2023, tergambar dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 5  
Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

| NO | SARANA<br>DAN<br>PRASARANA           | SATUAN | JUMLAH    |                                      |         |               |                 |                |                         |                       |
|----|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
|    |                                      |        | KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN<br>HINGGA TAHUN<br>2023 | KONDISI |               |                 |                | PENGADAAN<br>TAHUN 2023 | RENCANA<br>PENAMBAHAN |
|    |                                      |        |           |                                      | BAIK    | CUKUP<br>BAIK | RUSAK<br>RINGAN | RUSAK<br>BERAT |                         |                       |
| 1  | Kendaraan Roda Empat (Station Wagon) | Unit   | 5         | 4                                    | 1       | -             | 3               | -              | -                       | 1                     |
| 2  | Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)    | Unit   | 7         | 7                                    | 1       | -             | -               | 6              | -                       | -                     |
| 3  | Mesin Ketik                          | Unit   | -         | 1                                    | -       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 4  | Lemari Kayu                          | Unit   | 3         | 3                                    | 2       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 5  | Rak Besi                             | Unit   | 2         | 2                                    | 2       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 6  | Filing Cabinet Besi                  | Unit   | 15        | 15                                   | 7       | -             | 8               | -              | -                       | -                     |
| 7  | Papan Visual/Papan Nama              | Unit   | 1         | 1                                    | -       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |

| NO | SARANA<br>DAN<br>PRASARANA    | SATUAN | JUMLAH    |                                      |         |               |                 |                |                         |                       |
|----|-------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
|    |                               |        | KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN<br>HINGGA TAHUN<br>2023 | KONDISI |               |                 |                | PENGADAAN<br>TAHUN 2023 | RENCANA<br>PENAMBAHAN |
|    |                               |        |           |                                      | BAIK    | CUKUP<br>BAIK | RUSAK<br>RINGAN | RUSAK<br>BERAT |                         |                       |
| 8  | Mesin Absensi                 | Unit   | 1         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 9  | Overhead Projector            | Unit   | 1         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 10 | Display                       | Unit   | 1         | 1                                    | -       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 11 | Papan Nama Instansi           | Buah   | 1         | 1                                    | -       | -             | -               | 1              | -                       | -                     |
| 12 | Papan Pengumuman              | Buah   | 1         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 13 | Alat Kantor Lainnya (Scanner) | Unit   | 5         | 5                                    | -       | -             | -               | 5              | -                       | -                     |
| 14 | Meja Kerja Kayu               | Unit   | 35        | 35                                   | 35      | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 15 | Kursi Besi/Metal              | Unit   | 2         | 2                                    | 2       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 16 | Meja Rapat                    | Unit   | 6         | 6                                    | 6       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 17 | Kursi Rapat                   | Unit   | 68        | 68                                   | 40      | -             | 10              | 18             | -                       | -                     |

| NO | SARANA<br>DAN<br>PRASARANA          | SATUAN | JUMLAH    |                                      |         |               |                 |                |                         |                       |
|----|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
|    |                                     |        | KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN<br>HINGGA TAHUN<br>2023 | KONDISI |               |                 |                | PENGADAAN<br>TAHUN 2023 | RENCANA<br>PENAMBAHAN |
|    |                                     |        |           |                                      | BAIK    | CUKUP<br>BAIK | RUSAK<br>RINGAN | RUSAK<br>BERAT |                         |                       |
| 18 | Kursi Putar                         | Unit   | 1         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 19 | Bangku<br>Tunggu                    | Unit   | 4         | 4                                    | 2       | -             | 2               | -              | -                       | -                     |
| 20 | Lemari Es                           | Unit   | 1         | 1                                    | -       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 21 | A.C. Window                         | Unit   | 16        | 12                                   | 10      | -             | 2               | -              | 2                       | 2                     |
| 22 | Kipas Angin                         | Unit   | 3         | 3                                    | 2       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 23 | Treng Air /<br>Tandon Air           | Unit   | 1         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 24 | Televisi                            | Unit   | 5         | 3                                    | 2       | -             | 1               | -              | 1                       | 1                     |
| 25 | Sound System                        | Unit   | 2         | 2                                    | -       | -             | 1               | 1              | -                       | -                     |
| 26 | Camera Video                        |        | 1         | 1                                    | -       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 27 | Meja Kerja<br>Pejabat<br>Eselon II  | Unit   | 1         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 28 | Kursi Kerja<br>Pejabat<br>Eselon II | Unit   | 3         | 3                                    | 3       | -             | -               | -              | -                       | -                     |

| NO | SARANA<br>DAN<br>PRASARANA                       | SATUAN | JUMLAH    |                                      |         |               |                 |                |                         |                       |
|----|--------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
|    |                                                  |        | KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN<br>HINGGA TAHUN<br>2023 | KONDISI |               |                 |                | PENGADAAN<br>TAHUN 2023 | RENCANA<br>PENAMBAHAN |
|    |                                                  |        |           |                                      | BAIK    | CUKUP<br>BAIK | RUSAK<br>RINGAN | RUSAK<br>BERAT |                         |                       |
| 29 | Kursi Kerja<br>Pejabat<br>lainnya                | Unit   | 37        | 37                                   | 30      | -             | 6               | 1              | -                       | -                     |
| 30 | Kursi Rapat<br>Ruangan<br>Rapat Staf             | Unit   | 10        | 10                                   | 8       | -             | 2               | -              | -                       | -                     |
| 31 | Lemari Buku<br>Arsip Untuk<br>Arsip Dinamis      | Unit   | 4         | 4                                    | 3       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 32 | Facsimile                                        | Unit   | 1         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 33 | alat<br>komunikasi<br>telephone<br>lainnya (dst) | Unit   | 3         | 3                                    | 2       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 34 | Local Area<br>Network (LAN)                      | Unit   | 2         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | 1                       | -                     |
| 36 | Laptop                                           | Unit   | 9         | 7                                    | 4       | -             | -               | 3              | 2                       | -                     |
| 37 | Note Book                                        | Unit   | 26        | 26                                   | 20      | -             | -               | 6              | -                       | -                     |

| NO | SARANA<br>DAN<br>PRASARANA                     | SATUAN | JUMLAH    |                                      |         |               |                 |                |                         |                       |
|----|------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
|    |                                                |        | KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN<br>HINGGA TAHUN<br>2023 | KONDISI |               |                 |                | PENGADAAN<br>TAHUN 2023 | RENCANA<br>PENAMBAHAN |
|    |                                                |        |           |                                      | BAIK    | CUKUP<br>BAIK | RUSAK<br>RINGAN | RUSAK<br>BERAT |                         |                       |
| 38 | Line Printer                                   | Unit   | 26        | 26                                   | 20      | -             | 4               | 2              | -                       | -                     |
| 39 | Hard Disk                                      | Unit   | 2         | 2                                    | 2       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 40 | Peralatan<br>Minikomputer<br>lainnya           | Unit   | 1         | 1                                    | 1       | -             | -               | -              | -                       | -                     |
| 41 | Monitor                                        | Unit   | 2         | 2                                    | -       | -             | 2               | -              | -                       | -                     |
| 42 | Printer<br>(Peralatan<br>Personal<br>Komputer) | Unit   | 9         | 7                                    | 5       | -             | -               | 2              | 2                       | -                     |
| 43 | Scanner<br>(Peralatan<br>Personal<br>Komputer) | Unit   | 7         | 6                                    | 6       | -             | -               | -              | -                       | 1                     |
| 44 | Peralatan<br>Personal<br>Komputer<br>lainnya   | Unit   | 10        | 10                                   | 9       | -             | 1               | -              | -                       | -                     |
| 45 | Sofa                                           | Set    | 1         | -                                    |         | -             |                 |                | 1                       | -                     |

Sumber : Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023

Tabel 6

Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| NO | NAMA RUANGAN<br>GEDUNG KANTOR                       | JUMLAH    |                                      |      |               |                 |                | RENCANA<br>PENGGADAAN /<br>PENAMBAHAN<br>PERBAIKAN |
|----|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------|
|    |                                                     | KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN<br>HINGGA TAHUN<br>2023 | BAIK | CUKUP<br>BAIK | RUSAK<br>RINGAN | RUSAK<br>BERAT |                                                    |
| 1  | Ruang Pelayanan Depan                               | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 2  | Ruang Pelayanan Belakang                            | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | 1                                                  |
| 3  | Ruang Konsultasi                                    | 1         | 1                                    | -    | -             | 1               | -              | 1                                                  |
| 4  | WC Di Ruang Operator Pelayanan                      | 1         | 1                                    | -    | -             | 1               | -              | 1                                                  |
| 5  | WC Di Ruang Konsultasi                              | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 6  | Ruang Operator Pelayanan                            | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 7  | Ruang Kepala Bidang Dafduk/Capil dan Staf           | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | 1                                                  |
| 8  | Ruang Pencetakan Ktp Dan ADB                        | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 9  | Ruangan Loker                                       | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 10 | Ruangan Kasubag Perencanaan dan Kasubag Kepegawaian | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |

| NO | NAMA RUANGAN<br>GEDUNG KANTOR               | JUMLAH    |                                      |      |               |                 |                | RENCANA<br>PENGGADAAN /<br>PENAMBAHAN<br>PERBAIKAN |
|----|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------|
|    |                                             | KEBUTUHAN | KETERSEDIAAN<br>HINGGA TAHUN<br>2023 | BAIK | CUKUP<br>BAIK | RUSAK<br>RINGAN | RUSAK<br>BERAT |                                                    |
| 11 | Ruangan Sekretaris<br>Dinas                 | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 12 | Ruangan Bidang PIAK                         | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 13 | Ruangan Bidang Inovasi                      | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | 1                                                  |
| 14 | Ruangan Server                              | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 15 | Ruangan Rapat                               | 1         | 1                                    | 1    | -             | -               | -              | -                                                  |
| 16 | Ruangan Kepala Dinas                        | 1         | 1                                    | 1    | -             | -               | -              | -                                                  |
| 17 | Ruangan Kasubag<br>Keuangan                 | 1         | 1                                    | 1    | -             | -               | -              | -                                                  |
| 18 | Musholah                                    | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | -                                                  |
| 19 | Gudang Belakang                             | 3         | 3                                    | -    | 2             | 1               |                | -                                                  |
| 20 | WC di Luar Untuk<br>Pemohon                 | 2         | 2                                    | -    |               | 1               | 1              | 2                                                  |
| 21 | WC Di Ruangankepala<br>Dinas                | 1         | 1                                    | 1    | -             | -               | -              | -                                                  |
| 22 | Gudang Barang Habis<br>Pakai (Ruang Sekdis) | 1         | 1                                    | -    | 1             | -               | -              | 1                                                  |

Sumber : Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2023

Melihat kondisi sarana dan prasarana perkantoran kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, maka perlu adanya peningkatan dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang khususnya pada peningkatan kinerja aparatur. Beberapa kekurangan masih terdapat pada beberapa perlengkapan penunjang, seperti komputer PC dan printer. Oleh karena itu, guna mendukung optimalisasi tugas dan fungsi dinas, maka sarana dan prasarana penunjang diatas perlu dilakukan pengadaan barang sesuai kebutuhan.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Obyek pelayanan adalah penduduk WNI dan WNA yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bone sejumlah 814.106 Jiwa (Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2022 Kemendagri), adapun jenis – jenis pelayanan yang diberikan adalah sebagai berikut :

#### **Pelayanan Pendaftaran Penduduk :**

- 1) Pencatatan Biodata WNI dan Pencatatan Biodata Orang Asing (AO)
- 2) Kartu Keluarga(KK)
- 3) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- 4) Kartu Identitas Anak (KIA)
- 5) Surat Keterangan Pindah
- 6) Surat Keterangan Pindah Datang
- 7) Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
- 8) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
- 9) Surat Keterangan Tempat Tinggal

#### **Pelayanan Pencatatan Sipil :**

- 1) Surat Keterangan Kelahiran
- 2) Surat Keterangan Lahir Mati
- 3) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 4) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- 5) Surat Keterangan Kematian
- 6) Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- 7) Surat Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- 8) Surat Keterangan Pemggamti Identitas
- 9) Surat Keterangan Pencatatan Sipil

- 10) Akta Kelahiran
- 11) Akta Kematian
- 12) Akta Perkawinan
- 13) Akta Perceraian
- 14) Akta Pengangkatan Anak
- 15) Akta Pengesahan Anak

Jenis-jenis pelayanan inilah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam kapasitasnya sebagai institusi pelayanan publik khususnya bidang Administrasi Kependudukan (permohonan dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil).

Selanjutnya hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan oleh Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sampai dengan realisasi Tahun 2022 adalah sebagaimana yang tertera pada tabel 7 (TC-23) dibawah ini :

Tabel 7 (TC-23)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

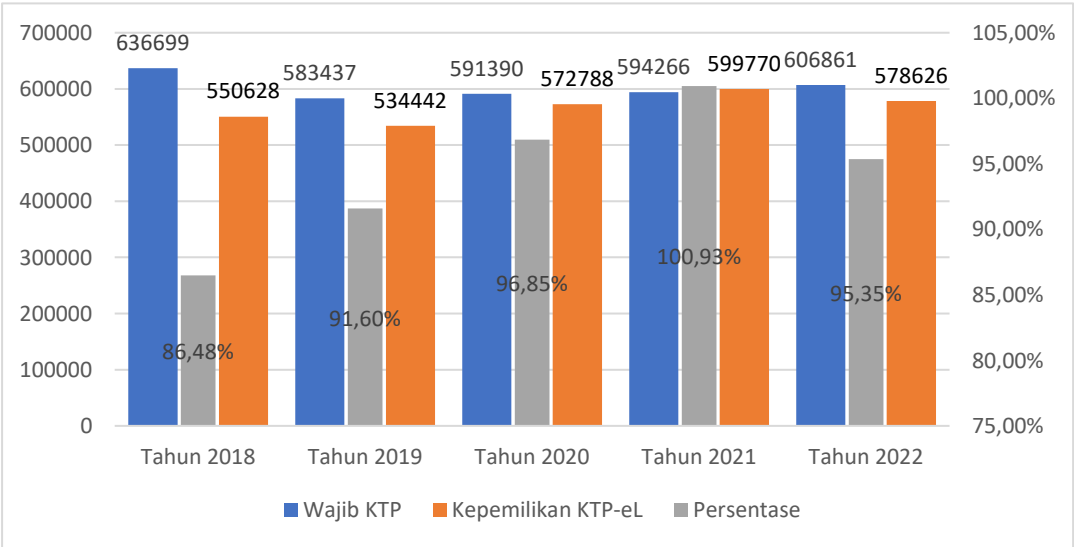
| No. | Idikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah                       | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Kon disi Awal 2018 | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022 |            |            |            |            | Realisasi Capaian Tahun 2018-2022 |            |                   |                    |      | Rasio Capaian pada Tahun 2018-2022 |             |             |                |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|--------------------|------|------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------|
|     |                                                                                 |             |            |                          |                    | 2019                                            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2019                              | 2020       | 2021              | 2022               | 2023 | 2019                               | 2020        | 2021        | 2022           | 2023 |
| 1   | 2                                                                               | 3           | 4          | 5                        | 6                  | 7                                               | 8          | 9          | 10         | 11         | 12                                | 13         | 14                | 15                 | 16   | 17                                 | 18          | 19          | 20             | 21   |
| 1   | Nilai Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                                         | -           | -          | -                        | CC                 | B                                               | B          | B          | B          | A          | B                                 | B          | A<br>(80,56%<br>) | *A<br>(80,75%<br>) | -    | (100%<br>)                         | (100%)      | 115%)       | *(115,36<br>%) | -    |
| 2   | Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil : |             |            |                          |                    |                                                 |            |            |            |            |                                   |            |                   |                    |      |                                    |             |             |                |      |
|     | - Kepemilikan KTP-eL                                                            | -           | -          | -                        | 83,79<br>%         | 86,79<br>%                                      | 89,00<br>% | 85,00<br>% | 90,00<br>% | 90,00<br>% | 91,60<br>%                        | 96,85<br>% | 100,93<br>%       | 95,35<br>%         | -    | 94,75<br>%                         | 104,82<br>% | 118,74<br>% | 105,94%        | -    |
|     | - Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)                                               | -           | -          | -                        | 85,00<br>%         | 87,00<br>%                                      | 90,00<br>% | 85,00<br>% | 90,00<br>% | 90,00<br>% | 88,86<br>%                        | 92,10<br>% | 93,27%            | 90,48<br>%         | -    | 97,91<br>%                         | 102,33<br>% | 109,73<br>% | 100,53%        | -    |
|     | - Kepemilikan Akta Kelahiran                                                    | -           | -          | -                        | 77,00<br>%         | 80,00<br>%                                      | 85,00<br>% | 85,00<br>% | 90,00<br>% | 90,00<br>% | 43,38<br>%                        | 45,55<br>% | 47,64%            | 48,75<br>%         | -    | 54,23<br>%                         | 53,59%      | 56,05%      | 54,17%         | -    |

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Berdasarkan Tabel 7 diatas, rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2022 telah mencapai target, namun masih ada 1 ( Satu ) Komponen indikator yang belum memenuhi target kinerja yang di sebakn oleh masih banyaknya Akta Kelahiran lama yang belum terdata di apalikasi Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian maka secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dan Dinas Kependudukan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2018-2023.

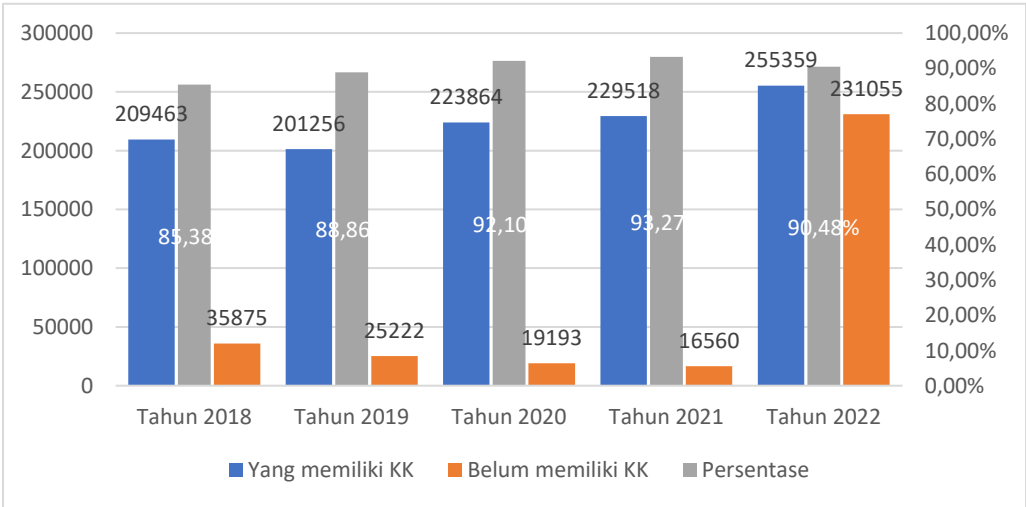
Dokumen Kependudukan seperti KTP-eL, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen Kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahuran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

PERSENTASE KEPEMILIKAN KTP-EI TAHUN 2018-2022



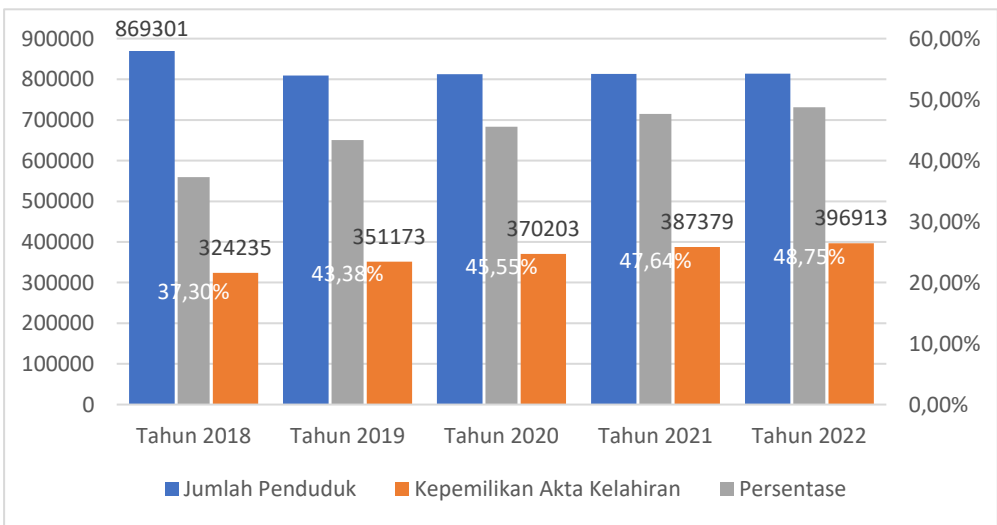
Grafik di atas menjelaskan bahwa Kepemilikan KTP-eL dari Tahun 2018-2021 Kabupaten Bone persentase Kepemilikan KTP-eL mengalami peningkatan akan tetapi pada 2022 persentase Kepemilikan KTP-eL mengalami penurunan di sebabkan adanya peralihan Sistem dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdistribusi ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat

PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA (KK)  
TAHUN 2018-2022



Grafik di atas menjelaskan bahwa Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dari Tahun 2018-2021 Kabupaten Bone persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) mengalami peningkatan akan tetapi pada 2022 persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) mengalami penurunan disebabkan adanya peralihan Sistem dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdistribusi ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.

PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN  
TAHUN 2018-2022



Grafik di atas menjelaskan bahwa Kepemilikan Akta Kelahiran dari Tahun 2018-2021 Kabupaten Bone persentase Kepemilikan Akta Kelahiran mengalami peningkatan akan tetapi pada 2022 persentase Kepemilikan Akta Kelahiran mengalami penurunan disebabkan adanya peralihan Sistem dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdistribusi ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat.

Dari aspek kerangka pendanaan atau anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bone pada periode Renstra sebelumnya (Tahun 2018 – 2023), anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah beserta realisasinya untuk periode tahun 2018-2023, dapat dilihat dalam tabel Tabel 8 (TC-24) berikut ini :

Tabel 8 ( TC-24)  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018-2023

| Uraian                                       | Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu) |               |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu) |               |               |               |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (Rp. Ribu) |       |       |       |             | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-----------|
|                                              | 2019                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2019                                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023 (Feb.) | 2019                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 (Feb.) | Anggaran              | Realisasi |
| (1)                                          | (2)                            | (3)           | (4)           | (5)           | (6)           | (7)                                      | (8)           | (9)           | (10)          | (11)        | (12)                                                 | (13)  | (14)  | (15)  | (16)        | (17)                  | (18)      |
| TOTAL ANGGARAN                               | 6.897.248.697                  | 6.967.219.696 | 6.847.937.306 | 4.947.115.093 | 5.410.686.208 | 6.769.976.398                            | 6.604.538.729 | 6.160.490.627 | 4.772.935.032 | 579.009.628 | 0,982                                                | 0,948 | 0,900 | 0,965 | 0,107       | -4,77%                | -29,89%   |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan)    | 2.971.616.697                  | 3.131.439.696 | 0             | 0             | 0             | 2.881.668.953                            | 2.965.589.706 | 0             | 0             | 0           | 0,970                                                | 0,947 | 0,000 | 0,000 | 0,000       | -23,66%               | -24,27%   |
| BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)      | 3.925.632.000                  | 3.835.780.000 | 6.847.937.306 | 4.947.115.093 | 5.410.686.208 | 3.888.307.445                            | 3.638.949.023 | 6.160.490.627 | 4.772.935.032 | 579.009.628 | 0,990                                                | 0,949 | 0,900 | 0,965 | 0,107       | 19,06%                | 15,72%    |
| BELANJA PEGAWAI (Program dan Kegiatan)       | 0                              | 0             | 3.228.434.306 | 3.146.318.053 | 3.130.674.208 | 0                                        | 0             | 2.910.105.283 | 3.067.604.543 | 481.477.611 | 0,000                                                | 0,000 | 0,901 | 0,975 | 0,154       | -0,76%                | -19,72%   |
| BELANJA BARANG & JASA (Program dan Kegiatan) | 3.614.692.000                  | 3.770.830.000 | 3.001.554.000 | 1.713.619.340 | 1.950.587.200 | 3.578.924.445                            | 3.573.999.023 | 2.654.485.344 | 1.623.650.489 | 97.532.017  | 0,990                                                | 0,948 | 0,884 | 0,947 | 0,050       | -11,29%               | -39,67%   |
| BELANJA MODAL (Program dan Kegiatan)         | 310.940.000                    | 64.950.000    | 617.949.000   | 87.177.700    | 329.424.800   | 309.383.000                              | 64.950.000    | 595.900.000   | 81.680.000    | 0           | 0,995                                                | 1,000 | 0,964 | 0,937 | 0,000       | 241,07%               | 138,04%   |
| Program Pelayanan                            | 762.516.900                    | 694.344.300   | 0             | 0             | 0             | 754.300.866                              | 688.053.709   | 0             | 0             | 0           | 0,989                                                | 0,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000       | -27,24%               | -27,20%   |

| Uraian                                                                         | Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu) |               |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu) |               |               |               |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (Rp. Ribu) |       |       |       |             | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-----------|
|                                                                                | 2019                           | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2019                                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023 (Feb.) | 2019                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 (Feb.) | Anggaran              | Realisasi |
| Administrasi Perkantoran                                                       |                                |               |               |               |               |                                          |               |               |               |             |                                                      |       |       |       |             |                       |           |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 551.653.300                    | 232.115.500   | 0             | 0             | 0             | 549.757.025                              | 223.251.900   | 0             | 0             | 0           | 0,997                                                | 0,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000       | -39,48%               | -39,00%   |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.905.000                      | 24.492.200    | 0             | 0             | 0             | 3.903.900                                | 24.492.200    | 0             | 0             | 0           | 1,000                                                | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000       | 106,80%               | -106,84%  |
| Program Penunjang Pemerintahan Umum                                            | 32.600.000                     | 56.620.000    | 0             | 0             | 0             | 32.406.000                               | 56.599.000    | 0             | 0             | 0           | 0,994                                                | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000       | -6,58%                | -6,34%    |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan                                     | 2.574.956.800                  | 2.828.208.000 | 0             | 0             | 0             | 2.547.939.654                            | 2.646.552.214 | 0             | 0             | 0           | 0,990                                                | 0,936 | 0,000 | 0,000 | 0,000       | -22,54%               | -24,03%   |
| Program Penunjang Urusan                                                       | 0                              | 0             | 6.711.678.306 | 4.799.071.093 | 4.639.762.308 | 0                                        | 0             | 6.028.551.227 | 4.652.749.832 | 564.009.628 | 0,000                                                | 0,000 | 0,898 | 0,970 | 0,122       | -7,95%                | -27,67%   |

| Uraian                                                  | Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu) |      |            |            |             | Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. Ribu) |      |            |            |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (Rp. Ribu) |       |       |       |             | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------|------------|------------|-------------|------------------------------------------|------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----------------------|-----------|
|                                                         | 2019                           | 2020 | 2021       | 2022       | 2023        | 2019                                     | 2020 | 2021       | 2022       | 2023 (Feb.) | 2019                                                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 (Feb.) | Anggaran              | Realisasi |
| Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                     |                                |      |            |            |             |                                          |      |            |            |             |                                                      |       |       |       |             |                       |           |
| Program Pendaftaran Penduduk                            | 0                              | 0    | 31.118.000 | 78.636.000 | 697.597.900 | 0                                        | 0    | 26.898.400 | 70.355.600 | 15.000.000  | 0,000                                                | 0,000 | 0,864 | 0,895 | 0,022       | 9,85%                 | 20,72%    |
| Program Pencatatan Sipil                                | 0                              | 0    | 42.805.000 | 19.858.000 | 38.326.000  | 0                                        | 0    | 42.805.000 | 7.592.000  | 0           | 0,000                                                | 0,000 | 1,000 | 0,382 | 0,000       | 9,85%                 | -45,57%   |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 0                              | 0    | 46.154.000 | 32.050.000 | 17.500.000  | 0                                        | 0    | 46.054.000 | 24.737.600 | 0           | 0,000                                                | 0,000 | 0,998 | 0,772 | 0,000       | -18,99%               | -36,57%   |
| Program Pengelolaan Profil Kependudukan                 | 0                              | 0    | 16.182.000 | 17.500.000 | 17.500.000  | 0                                        | 0    | 16.182.000 | 17.500.000 | 0           | 0,000                                                | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000       | 2,04%                 | -22,96%   |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik. Rasio antara realisasi dan anggaran pada umumnya dapat dikategorikan baik. Rasio terendah adalah 0,107 % pada tahun Terakhir Karena Posisi Bulan Februari 2023 dan Rasio tertinggi adalah 92,22% pada tahun keempat dapat dikatakan sangat baik. Rata – Rata pertumbuhan anggaran sebesar 29,65% dengan Rata – Rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 33,31 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Laporan pertanggungjawaban realiasi keuangan tidak tepat waktu, sehingga mengganggu untuk pengajuan anggaran berikutnya.
2. Adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan anggaran tidak terealisasi.

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan ( Stake Holder )

Kelompok Sasaran Layanan (Stake Holder) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, meliputi :

1. Masyarakat Kab. Bone selaku stakeholder utama
2. Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekda & DPRD)-Stakeholder Eksternal
3. Perangkat Daerah Kab. Bone (Badan, Dinas, Kecamatan, Kelurahan, UPTD dan Sekolah) – Stakeholder Eksternal
4. Pemerintah Kecamatan – Stakeholder Eksternal
5. Pemerintah Desa – Stakeholder Eksternal
6. Aparatur Pemerintahan Lingkup Pemerintah Kab. Bone – Stakeholder Eksternal

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan

masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Hal ini berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone agar terdapat sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal tersebut, dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

### 1. Faktor Internal

#### **Kekuatan (Strength) :**

- a. Adanya Dukungan tentang keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone
- c. Adanya komitmen Bersama dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- d. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- e. Kebutuhan untuk tersedianya database kependudukan yang akurat, dan ketersediaan data tersebut sangat dibutuhkan oleh institusi atau lembaga lain.

#### **Kelemahan (Weakness) :**

- a. Belum terpenuhinya jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan terutama yang memiliki kemampuan teknis dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan bidang Teknologi Informasi yang terkait dalam pengolahan data kependudukan dan pengendalian kuantitas penduduk;
- b. Belum meratanya kapasitas/kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta dalam pengelolaan kegiatan;
- c. Sarana dan prasarana kerja yang masih terbatas.
- d. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan, sehingga mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

## 2. Faktor Eksternal

### **Peluang (Opportunity) :**

- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses.
- b. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum
- c. Adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan;
- e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan.

### **Ancaman (Threat) :**

- a. Masih kurangnya aksesibilitas terhadap pelayanan administrasi kependudukan, yang disebabkan jarak yang jauh, sementara kemampuan masyarakat pengguna teknologi informasi masih terbatas
- b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan.
- c. Masih kurangnya kesadaran petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
- d. Kurangnya koordinasi antar lembaga/ lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
- e. Rendahnya pengetahuan aparat pengelola Administrasi Kependudukan Tingkat Kabupaten, Desa dan Kelurahan.

## 3. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Dari analisis SWOT didapat 6 (enam) faktor penentu keberhasilan. Adapun faktor penentu tersebut sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia yang menguasai teknologi Informasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- c. Renstra dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)
- d. Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- e. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas Pokok dan Fungsi.

- f. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kependudukan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki faktor internal (Kelemahan dan Kekuatan) dan faktor eksternal (Ancaman dan Peluang). Faktor internal dan faktor eksternal kemudian dikelompokkan untuk dianalisis tantangan dan peluangnya dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah. Selanjutnya faktor internal dan faktor eksternal tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT pada BAB selanjutnya untuk menghasilkan strategi dalam rangka pengembangan perangkat daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Bone berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Bone.

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan maka dibutuhkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Beberapa permasalahan-permasalahan pelayanan terutama yang berkaitan dengan aspek pokok kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tebal 9

Identifikasi Permasalahan Sesuai Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

| Tupoksi                                                                                                                                                                               | Masalah                                                  | Akar Masalah / Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi | 1. Belum seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan; | 1. Belum semua penduduk sadar Adminduk<br>2. Lokasi geografis tempat tinggal masyarakat pemohon yang jauh dari tempat pelayanan administrasi kependudukan;<br>3. Belum tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai; |

| Tupoksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Masalah                                                                                                   | Akar Masalah / Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan<br>5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas Dan Fungsinya. | 2. Belum seluruh penduduk terjangkau hak - hak layanan publik yang terintegrasi dengan data kependudukan. | 1. Terbatasnya SDM yang kompeten baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna mendukung tercapainya pelayanan prima administrasi kependudukan;<br>2. SOP belum mengikuti regulasi yang bersifat dinamis;<br>3. Institusi pengguna data belum memahami pentingnya data kependudukan dari Dukcapil;<br>4. Sosialisasi adminduk belum menjangkau semua unsur lapisan;<br>5. Budaya masyarakat yang menunda pengurusan administrasi kependudukan sehingga data kependudukan tidak valid dan akurat. |

3.2. Telaahan terhadap Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

Penelaahan terhadap Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026.

Tabel 10  
TUJUAN DAN SASARAN DAERAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)  
TAHUN 2024-2026

| No. | Tujuan                                                                            | Indikator                     | Sasaran                                                                | Indikator                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berorientasi pelayanan | 1. Indeks Reformasi Birokrasi | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah              | 1. Nilai SAKIP                                |
|     |                                                                                   |                               | 2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah                   | 2. Indeks pengelolaan keuangan daerah         |
|     |                                                                                   |                               | 3. Meningkatnya efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan | 3. Tingkat maturitas SPIP                     |
|     |                                                                                   |                               | 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inklusif                | 4. Indeks pelayanan publik                    |
| 2.  | Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang inklusif                          | 2. Persentase Penduduk Miskin | 1. Menurunnya angka pengangguran                                       | 1. Tingkat pengangguran terbuka               |
|     |                                                                                   |                               | 2. Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing                 | 2. Indeks pembangunan manusia                 |
|     |                                                                                   |                               | 3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa           | 3. Indeks desa membangun                      |
|     |                                                                                   |                               | 4. Meningkatnya perekonomian daerah                                    | 4. Pertumbuhan ekonomi tingkat inflasi daerah |
|     |                                                                                   |                               | 5. Terwujudnya pemerataan Pendapatan                                   | 5. Indeks gini                                |
| 3.  | Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan                        | 3. Indeks Infrastruktur       | 1. Terciptanya ketaatan terhadap RTRW                                  | 1. Ketataan terhadap RTRW                     |
|     |                                                                                   |                               | 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                              | 2. Indeks kualitas lingkungan hidup           |

➤ **Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026  
Pemerintah Provinsi terkait**

Penelaahan pada Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat mempengaruhi pencapaian pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026, bahwa masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam tiga tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah adalah perbedaan/kesenjangan (gap) pencapaian antar kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa akan datang, permasalahan pembangunan daerah yang dibagi menjadi dua aspek tujuan pembangunan daerah yaitu kesejahteraan masyarakat dan aspek Daya Saing serta permasalahan menurut penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan isu–isu strategis baik Global, Nasional maupun Isu Strategis Pembangunan Daerah yang terbagi sebagai berikut :

1. Permasalahan Pembangunan Daerah.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Stabil.
3. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Meningkatnya Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin.
5. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran.
6. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat.
7. Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Optimal.
8. Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah.
9. Menurunnya Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pembangun sampai dengan kondisi triwulan kedua tahun 2022 serta amanat dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025. Sasaran ini juga juga memperhatikan sasaran

pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan tahapan akhir dari pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan. Visi ini dirumuskan dengan memperhatikan visi RPJPN, isu-isu strategis pembangunan daerah dan aspirasi pemangku kepentingan daerah. Visi ini selanjutnya diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD guna menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun RPJMD berkenaan, adapun Visi Daerah Sulawesi Selatan **"Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan"** Pada visi ini terdapat tiga pokok visi yakni Provinsi Terkemuka, Kemandirian Lokal dan Bernafaskan Keagamaan. Ketiga pokok visi ini merupakan kesatuan holistik dalam menyatakan kondisi yang hendak diwujudkan oleh tatanan Sulawesi Selatan dan memiliki maksa sebagai berikut :

- Provinsi Terkemuka** adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai terkait dengan capaian kinerja pada aspek-aspek pembangunan tertentu serta tingkat akselerasi dalam proses pencapaian kinerja
- Kemandirian Lokal** adalah gambaran tentang pendekatan yang ditempuh dalam mencapai posisi sebagai provinsi terkemuka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa posisi terkemuka Sulawesi Selatan di Indonesia terwujud melalui kemandirian dari wilayah dan masyarakat yang berinterkoneksi satu sama lain.
- Bernafaskan Keagamaan** adalah landasan etik dan moral bagi kemandirian lokal dalam terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka di Indonesia.

Adapun Misi RPJMD didasarkan pada 5 (lima) fungsi utama pemerintahan, yakni :

- 1. **Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan** dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada:
  - a. Akselerasi dukungan pemerintah Provinsi pada kabupaten dengan capaian pembangunan manusia yang berada di bawah rata-rata provinsi.
  - b. Penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan.

- c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif.
- d. Perwujudan standar pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan yang konsisten pada semua pihak.
- e. Pengelolaan RSUD Daerah dan Unit Pelayanan Kesehatan yang professional dan berstandar tinggi.
- f. Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- g. Pengembangan wirausaha perdesaan; Peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, serta pembinaan mental dan spiritual pemuda.
- h. Peningkatan pembibitan, pembinaan dan minat olahraga yang dilakukan secara sistematis dan terpadu.
- i. Peningkatan kualitas peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah serta mendukung akses secara nasional.
- j. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan perempuan (trafiking), serta penerapan peraturan perundangan-undangan terkait secara baik.
- k. Peningkatan koordinasi pembinaan keluarga berencana.
- l. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya.
- m. Penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga budaya/organisasi kesenian tradisional sebagai ujung tombak upaya-upaya penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan.
- n. Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar umat beragama, dan tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama secara baik.
- o. Peningkatan kesadaran umat beragama untuk tidak mudah terprovokasi dalam menerima ajaran agama yang sesat, penghasut dan perusuh.

**2. Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas**

**Pembelajar** dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada:

- a. Pengembangan situasi kondusif bagi aktivitas kelompok/organisasi masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial-budaya.
- b. Pergeseran struktur perekonomian menuju perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dan teknologi.
- c. Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang.
- d. Pemeliharaan tatanan kehidupan sosial yang kondusif dan tanggap terhadap berbagai kerawanan dan kerentanan sosial.
- e. Fasilitasi pengembangan science-park dan techno-park.
- f. Fasilitasi terwujud-nya masyarakat melek iptek antara lain melalui upaya pengenalan iptek sejak dini pada generasi muda.
- g. Pembinaan dan pengembangan desa adat dan komunitasnya.
- h. Peningkatan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pencapaian target-target pembangunan nasional.
- i. Pengembangan kerjasama pembangun-an antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain.

**3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif**

dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada:

- a. Pengembangan sistem pengamanan dan perlindungan masyarakat secara swakarsa pada tataran desa/kelurahan yang sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah desa/kelurahan serta dibina secara teknis oleh aparat keamanan setempat.
- b. Pengembangan sistem deteksi dini potensi konflik sosia
- c. Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
- e. Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- f. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesi-onalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang di dasarkan pada etika dan moral yang tinggi.

**4. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan** dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada:

- a. Pengembangan jalur-jalur pemerataan dalam hal peluang kerja dan peluang usaha.
- b. Pengembangan sistem upah kerja yang mendorong peningkatan pendapatan pekerja.
- c. Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi.
- d. Pelibatan secara efektif dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial korporasi.
- e. Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan.
- f. Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan.
- g. Hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis.
- h. Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan.
- i. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan khususnya pada jalur interkoneksi antar wilayah yang penggunaannya sudah sangat padat.
- j. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dalam mengakselerasi perekonomian Sulawesi Selatan dan lintas Sulawesi.
- k. Pengembangan sarana-prasarana pelabuhan yang dapat mengakselerasi posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat interkoneksi logistik di kawasan Timur Indonesia.
- l. Pengembangan sumber energi listrik alternatif (PLTMH, energi bayu) terbarukan.
- m. Pengelolaan pertambangan berorientasi pengolahan secara berkelanjutan.
- n. Fasilitasi berkembangnya kota cerdas (smart city) di Sulawesi Selatan.
- o. Penataan komprehensif terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya air terutama dalam menjamin keberlanjutan keterpenuhan kebutuhan air perkotaan.
- p. Perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan melalui mekanisme insentif dan disinsentif.
- q. Pemanfaatan secara lestari atas lahan pangan berkelanjutan
- r. Koordinasi kabupaten/ kota dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
- s. Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu.

- t. Kordinasi dan fasilitasi akselerasi capaian kinerja pembangunan pada kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari daratan utama.
- u. Pengembangan kerjasama dan sinergi pembangunan antar provinsi pada wilayah perbatasan.
- v. Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah, air dan udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten.
- w. Fasilitasi dan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir.
- x. Peningkatan kapasitas multipihak dalam pelaksanaan pencegahan, penyelamatan, dan perbaikan kerusakan lingkungan.
- y. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder masyarakat dan swasta dalam deteksi dini bencana, penanganan saat bencana dan pemulihan pasca bencana.
- z. Fasilitasi pengembang-an kota cerdas dan masyarakat kota berbasis pengetahuan (knowledge based society).
- aa. Dukungan pengembangan interaksi perdesaan-perkotaan serta pertumbuhan kawasan agropolitan dan minapolitan.

**5. Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional** dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada:

- a. Penggalan dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara.
- b. Revitalisasi dan penguatan jalur-jalur perkapalan/pe-layaran niaga Bugis- Makassar dalam mendukung pergerakan logistik Nusantara.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan.
- d. Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

Perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada penyusunan RPD ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merumuskan sebuah konsep RPD 2024-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025.
2. Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
3. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
4. Permasalahan dan Isu-isu strategis Pembangunan Daerah.

Keempat dimensi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep RPD yang kemudian diturunkan menjadi prioritas dan rangkaian rumusan tujuan dan sasaran Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026. Muatan RPD Tahun 2024- 2026 adalah bagian upaya untuk mewujudkan Visi RPJPD yaitu Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan. Disamping itu RPD Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dari RPJMD tahun 2018-2023. Muatan tersebut merupakan muatan pembangunan daerah yang menjadi inklusifitas dimana semua warga Siulawesi selatan dapat merasakan dampak dan manfaat pembangunan secara merata dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut maka ditetapkan 4 Tujuan yang menjadib acuan prioritas pembangunan pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:

**1. Mengoptimalkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang akuntabel.**

Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis sebagi berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
- b. Optimalnya kualitas pelayanan publik.

**2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata.** Tujuan kedua ini dijabarkan melalui sasaran strategis yaitu: meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah. Pencapaian sasaran

strategis tersebut melalui peningkatan kinerja kemantapan jalan, cakupan irigasi kondisi baik, ketersediaan Pelabuhan pengumpan, elektrifikasi.

- 3. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata.** Tujuan ketiga ini dijabarkan kedalam sasaran strategis sebagai berikut:
- Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja.
  - Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas.
  - Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat.
  - Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif
  - Meningkatnya Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

**4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang Berkelanjutan.**

Tujuan ke empat ini dijabarkan kesadalam sasaran strategis Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang meliputi :

- Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kelembagaan dan informasi administrasi kependudukan;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kelembagaan dan informasi administrasi kependudukan;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kelembagaan dan informasi administrasi kependudukan;
- Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- Menyelenggarakan pembinaan teknis dan supervisi dibidang pendaftaran penduduk, pencacatan Sipil, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

6. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran penduduk dan pencacatan Sipil, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang fasilitasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kelembagaan dan informasi administrasi kependudukan;
8. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan kependudukan, pencatatan sipil.

Ditinjau dari sisi tugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara umum terkait dengan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dan berkontribusi langsung dalam mendukung (sasaran keberapa) pencapaian Tujuan ke 1 (satu) **Mengoptimalkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel.**

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 utamanya pada misi tersebut antara lain :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan perundang-undangan berwenang dalam koordinasi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Tingkat pendidikan SDM yang mayoritas cukup baik;
3. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
4. Koordinasi yang telah terjalin cukup baik dengan perangkat daerah kabupaten/ kota khususnya penyelenggara urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sulawesi Selatan 2024-2026 antara lain :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatata sipil dengan perangkat daerah kabupaten/ kota;
3. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data administrasi kependudukan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Masih minimnya alokasi anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

➤ **Telaahan Renstra K/L**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan hal tersebut, akan dipaparkan telaahan Renstra K/L yang terkait dengan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tuangkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024.

➤ **Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024**

Menurut Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020-2024, isu yang berkaitan dengan bidang kependudukan adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan non KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen kependudukan tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat dilakukan dimana

saja. Tanda Tangan secara Elektronik pada dokumen kependudukan mendorong pengembangan pelayanan digital lainnya seperti: Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pencetakan dokumen di rumah penduduk. Dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik antara lain Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan.

Selanjutnya, database kependudukan Kementerian Dalam Negeri telah digunakan sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 serta Pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, telah ditandatangani 49 (empat puluh sembilan) Memorandum of Understanding (MoU), dan telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga maupun Lembaga Pengguna sebanyak 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) PKS untuk mengakses data kependudukan yang dimanfaatkan bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.

Kementerian Dalam Negeri juga telah mengembangkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan penerapan ADM ini masyarakat tidak harus datang ke Dinas Dukcapil untuk mengambil hasil pengurusan dokumen, akan tetapi dapat langsung mencetak dokumen kependudukan pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Dengan pelayanan online/daring penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu datang ke Kantor Dukcapil atau pusat pelayanan administrasi kependudukan.

Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor. Pengurusan dokumen kependudukan lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan.

Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga dilakukan inovasi berupa pelayanan terintegrasi.

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan

Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam **Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Adaptif.** Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.
- 2) **Profesional.** Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) **Proaktif.** Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
- 4) **Inovatif.** Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam mencapai Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2018 –

2023. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak secara langsung terkait dengan kebijakan Struktur dan Pola ruang.

### 3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan Telaahan KLHS RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkontribusi terhadap capaian indikator sebagai berikut :

1. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.
2. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
3. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
4. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.
5. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bone, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Selanjutnya Telaahan KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pelayanan OPD yang berimplikasi negative terhadap Lingkungan Hidup.

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor - faktor penghambat dan factor - faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi KLHS adalah :

### 1. *Faktor Penghambat*

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, namun hal ini tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang memadai.

### 2. *Faktor Pendorong.*

- (1) Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan .
- (2) Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, walaupun keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana yang dimiliki.

## 3.4 **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat ditemukan beberapa isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

1. Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menggunakan informasi teknologi (IT) seharusnya di sertai dengan pelayanan online (Daring) untuk memudahkan pelayanan.
2. Penguatan kemampuan petugas layanan baik teknis maupun Administratif dengan senantiasa mengacu pada regulasi yang ada.
3. Pengusulan Inovasi pelayanan dan kerja sama dengan OPD dalam hal Pemanfaatan data.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, khususnya pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan mengetahui tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, memiliki batas waktu dan dapat dilakukan monitoring yang dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran adalah ukuran pencapaian dari tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan tujuan perangkat daerah sendiri yang terkait dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Demi mewujudkan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Bone, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Tujuan yang merupakan bagian integral dalam proses

Perencanaan Strategis yaitu **“Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil”**, Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dirumuskan sasaran yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perumusan Tujuan dan Sasaran ini telah disesuaikan dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana fungsinya adalah meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dan berkontribusi langsung dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026 yaitu Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Akuntabilitas kinerja pembangunan yang efektif.

Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah beserta indicator kinerjanya disajikan dalam **Tabel T-C.25** sebagai berikut :

Tabel 11 (TC - 25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan                                                                                                | Indikator Tujuan                                                   | Sasaran                                                                    | Indikator Sasaran                                                     | Target Kinerja Tujuan / sasaran Pada Tahun |       |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|
|    |                                                                                                       |                                                                    |                                                                            |                                                                       | 2024                                       | 2025  | 2026  |
| 1  | 2                                                                                                     | 3                                                                  | 4                                                                          | 5                                                                     | 7                                          | 8     | 9     |
| 1  | Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | Indeks Pelayanan Publik (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil) | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil    | Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil) | 80,00                                      | 81,00 | 82,00 |
|    |                                                                                                       | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP                                     | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Nilai Prendikat Evaluasi SAKIP oleh APIP                              | 81,00                                      | 81,25 | 81,50 |

4.2 Cascading Perangkat Daerah

Dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan pada khususnya tujuan dan sasaran Renstra PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, maka diperlukan Cascading dalam penentuan pencapaian target agar dapat tercapai dengan tepat sasaran sesuai dengan yang diinginkan oleh perangkat daerah.

Adapun Cascading Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam **Gambar 3** sebagai berikut :

Gambar 3

Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2024-2026

|                                                     |                                                                                                              |  |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TUJUAN RPD<br/>KAB. BONE<br/>2024-2026</b>       | <b>Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang semakin baik dan Berorientasi Pelayanan</b>                     |  |                                                                                           |
| INDIKATOR<br>TUJUAN                                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                                   |  |                                                                                           |
| <b>SASARAN RPD<br/>KAB. BONE<br/>2024-2026</b>      | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Inklusif</b>                                                  |  | <b>Meningkatnya Akuntabilitas<br/>Kinerja Pemerintah Daerah</b>                           |
| INDIKATOR<br>SASARAN                                | Indeks Pelayanan Publik                                                                                      |  | Nilai SAKIP Kabupaten                                                                     |
| <b>TUJUAN<br/>RENSTRA</b>                           | <b>Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b> |  |                                                                                           |
| INDIKATOR<br>TUJUAN                                 | Indeks Pelayanan Publik ( Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil)                                          |  | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP                                                            |
| <b>SASARAN<br/>RENSTRA</b>                          | <b>Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</b>                               |  | <b>Meningkatnya Akuntabilitas<br/>Kinerja Dinas Kependudukan<br/>dan Pencatatan Sipil</b> |
| INDIKATOR<br>SASARAN                                | Indeks Kepuasan Masyarakat ( Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil )                                      |  | Nilai Prendikat Evaluasi SAKIP<br>oleh APIP                                               |
| <b>PENANGGUNG<br/>JAWAB<br/>SASARAN<br/>RENSTRA</b> | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                                               |  |                                                                                           |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| PROGRAM                             | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                             | Program Pencatatan Sipil                      | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                    | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASARAN PROGRAM                     | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil                                                  | Meningkatnya Penerbitan Akta Pencatatan Sipil | Meningkatnya Pengolahan Data Kependudukan, Kerja sama dan Pemanfaatan Data dalam bentuk Pelaporan Data Kependudukan                                                        | Meningkatnya Pengelolaan Data Kependudukan dalam bentuk buku Profil Kependudukan Data Agregat | Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| INDIKATOR PROGRAM                   | Persentase Perekaman KTP Elektronik dan Persentase Perekaman anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil      | Cakupan Pengolahan dan Penyajian, Kerja sama Pemanfaatan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                            | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan                                                       | Persentase Program Teknis Perangkat Daerah dengan Nilai Capaian Kinerja Tinggi (Minimal 76%)  |
| UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB PROGRAM | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                    | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil             | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                        | Sekretaris                                                                                    |

---

| KEGIATAN 1         | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk       | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil         | Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                              | Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan                     | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SASARAN KEGIATAN   | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan   | Akta Pencatatan Sipil                       | Pengolahan dan Penyajian Data, Kerja Sama dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        | Data Kependudukan dalam bentuk buku profil dan data Agregat | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan jenis dokumen yang wajib disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
| INDIKATOR KEGIATAN | Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kependudukan | Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil | Cakupan Dokumen/Laporan Pengolahan dan Penyajian Data dan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Persentase Buku Profil Kependudukan yang diterbitkan        | Persentase Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah                                                                          |

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

|                           |                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEGIATAN 2</b>         | <b>Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>                                               | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                                           | <b>Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                               | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             |
| <b>SASARAN KEGIATAN</b>   | Terselenggaranya Penataan Pendaftaran Pendudukan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bone | Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengadaan Dokumen Kependudukan                     | Pemantauan, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Informasi Administrasi Kependudukan                                                    | Terselenggaranya Pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah                             |
| <b>INDIKATOR KEGIATAN</b> | Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk                                                    | Persentase Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengadaan Dokumen Kependudukan | Persentase Pelaksanaan ,Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Informasi Administrasi Kependudukan                           | Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Periodik Perangkat Daerah        |
| <b>KEGIATAN 3</b>         | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>                                        | <b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                                                  | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                                        | <b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                             |
| <b>SASARAN KEGIATAN</b>   | Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk masyarakat Kabupaten Bone                             | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                  | Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                   | Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            |
| <b>INDIKATOR KEGIATAN</b> | Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                             | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                           | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam bentuk rekapan realisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan | Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |
| <b>KEGIATAN 4</b>         | <b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>               |                                                                                                                            | <b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>                                               | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                          |
| <b>SASARAN KEGIATAN</b>   | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                               |                                                                                                                            | Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                           | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah                          |
| <b>INDIKATOR KEGIATAN</b> | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                    |                                                                                                                            | Pembinaan dan Pengawasan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                           | Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah         |

| KEGIATAN 5         |
|--------------------|
| SASARAN KEGIATAN   |
| INDIKATOR KEGIATAN |

| KEGIATAN 6         |
|--------------------|
| SASARAN KEGIATAN   |
| INDIKATOR KEGIATAN |

| KEGIATAN 7         |
|--------------------|
| SASARAN KEGIATAN   |
| INDIKATOR KEGIATAN |

| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah                  |
| Persentase ketersediaan Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah |

| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah             |
| Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |

| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada perangkat Daerah        |
| Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan perangkat Daerah |

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

|                                              |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                           |                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEGIATAN 8                                   |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                           | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>        |
|                                              |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah |
|                                              |                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                           | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah         |
| UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN         | Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                     | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                      | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     | Sekretaris                                                                |                                                                                              |
| KEGIATAN 1                                   | Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                   | Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                    | Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                                                                 | Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan                    | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                              |
| SUB KEGIATAN 1                               | Sub Keg. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan             | Sub Keg. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting             | Sub Keg. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                        | Sub Keg. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota       | Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                              |
| SASARAN SUB KEGIATAN 1                       | Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan          | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting        | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                   | Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota               | Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                           |                                                                                              |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 1                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan                                                                                                                 | Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |                                                                                              |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                                    | Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian                                    | Sub koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                 | Sub Koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Kasubag Perencanaan                                                       |                                                                                              |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

|                                              |                                                                                                 |                                                                                  |                                                         |                                                                                                  |                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 2                               | Sub Keg. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk             | Sub Keg. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                            | Sub Keg. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan        | Sub Keg. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   |
| SASARAN SUB KEGIATAN 2                       | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk        | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil                                          | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  | Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain         | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 2                     | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD      |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                                          | Sub Koordinator Kelahiran                                                        | Sub.Koordinator Kerjasama                               | Sub Koordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi          | Kasubag Perencanaan                                                                   |
| SUB KEGIATAN 3                               | Sub Keg. Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                                              | Sub Keg. Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil             |                                                         |                                                                                                  | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                           |
| SASARAN SUB KEGIATAN 3                       | Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                                         | Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil        |                                                         |                                                                                                  | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 3                     | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk            | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil |                                                         |                                                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD      |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                                          | Sub Koordinator Kelahiran                                                        |                                                         |                                                                                                  | Kasubag Perencanaan                                                                   |

|                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 4                               | Sub Keg. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                   | Sub Keg. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil         |
| SASARAN SUB KEGIATAN 4                       | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                           | Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil         |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 4                     | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                       | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                                                | Sub Koordinator Kelahiran                                                                                                                                          |
| SUB KEGIATAN 5                               | Sub Keg. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan       | Sub Keg. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan                                 |
| SASARAN SUB KEGIATAN 5                       | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan  | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan                                        |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 5                     | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia                               |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                                                | Sub Koordinator Kelahiran                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                              |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD      |
| Kasubag Perencanaan                                                                                                                                                         |

|                                              |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 6                               | Sub Keg. Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan      |
| SASARAN SUB KEGIATAN 6                       | Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 6                     | Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan          |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Pendataan Penduduk                             |

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 7                               | Sub Keg. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan       |
| SASARAN SUB KEGIATAN 7                       | Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan  |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 7                     | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                        |

| KEGIATAN 2                                   | Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                   | Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                                                                                                                 | Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                               | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 1                               | Sub Keg. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan   | Sub Keg. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam             | Sub Keg. Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan             | Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN        |
| SASARAN SUB KEGIATAN 1                       | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan                  | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam        | Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan        | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 1                     | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Pendataan Penduduk                                                                                                       | Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian                                                                                                                                                                                                                 | Sub Koordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi                                                                                | Kasubag Keuangan                                  |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>2                            | Sub Keg. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota             | Sub Keg. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan       | Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
| SASARAN SUB KEGIATAN 2                       | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota        | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan  | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 2                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub Koordinator Pemanfaatan Dokumen Kependudukan             | Kasubag Keuangan                                                          |

|                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 3                               | Sub Keg. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil             | Sub Keg. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                  |
| SASARAN SUB KEGIATAN 3                       | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil        | Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 3                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                    |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Kelahiran                                                                                                                         | Sub Koordinator Pemanfaatan Dokumen Kependudukan                                 | Kasubag Keuangan                                                                                                                                      |
| SUB KEGIATAN 4                               | Sub Keg. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                      |                                                                                  | Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                              |
| SASARAN SUB KEGIATAN 4                       | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil                 |                                                                                  | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 4                     | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil          |                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD    |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian                                                                               |                                                                                  | Kasubag Keuangan                                                                                                                                      |

|                                              |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 5                               | Sub Keg. Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil              |
| SASARAN SUB KEGIATAN 5                       | Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil         |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 5                     | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil  |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian                                             |
| SUB KEGIATAN 6                               | Sub Keg. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil       |
| SASARAN SUB KEGIATAN 6                       | Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil  |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 6                     | Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian                                             |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

|                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| KEGIATAN 3                                   | Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                                                          | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                          | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    |
| SUB KEGIATAN 1                               | Sub Keg. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk                              | Sub Keg. Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil             | Sub Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |
| SASARAN SUB KEGIATAN 1                       | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk                         | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil        | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 1                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                  |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                                                                                                                 | Sub Koordinator Kelahiran                                                                                                                   | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                       |
| SUB KEGIATAN 2                               | Sub Keg. Fasilitas Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                | Sub Keg. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                                  | Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 2                       | Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                  | Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil                                                                                                 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD          |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 2                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan                                                                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD         |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                                                                                                                 | Sub Koordinator Kelahiran                                                                                                                   | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                       |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

|                                              |                                                                                  |                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 3                               | Sub Keg. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                                        | Sub Keg. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil             |
| SASARAN SUB KEGIATAN 3                       | Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk                                           | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil        |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 3                     | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Pendataan Penduduk                                               | Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian                      |

|                                              |                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| KEGIATAN 4                                   | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk |
| SUB KEGIATAN 1                               | Sub Keg. Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                 |
| SASARAN SUB KEGIATAN 1                       | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk            |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 1                     | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk           |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN | Sub Koordinator Identitas Kependudukan                                 |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |
| Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan           |
| Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan          |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                    |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 2                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 2                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 2                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |
| SUB KEGIATAN 3                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 3                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 3                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                          |
| Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     |
| Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        |
| Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi              |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         |
| Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>4                                        |
| SASARAN SUB<br>KEGIATAN 4                                |
| INDIKATOR SUB<br>KEGIATAN 4                              |
| SUB UNIT<br>KERJA<br>PENANGGUNG<br>JAWAB SUB<br>KEGIATAN |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>5                                        |
| SASARAN SUB<br>KEGIATAN 5                                |
| INDIKATOR SUB<br>KEGIATAN 5                              |
| SUB UNIT<br>KERJA<br>PENANGGUNG<br>JAWAB SUB<br>KEGIATAN |

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Sosialisasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                        |
| Terlaksananya Sosialisasi<br>Peraturan Perundang-Undangan                   |
| Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan |
| Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                                             |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                    |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan               |
| Jumlah Orang yang Mengikuti<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan |
| Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                                                              |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| KEGIATAN 5                                   |
| SUB KEGIATAN 1                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 1                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 1                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 2                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 2                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 2                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        |
| Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor        |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  |
| Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                       |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor          |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  |
| Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                   |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 3                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 3                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 3                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |
| SUB KEGIATAN 4                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 4                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 4                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |
| SUB KEGIATAN 5                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 5                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 5                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                  |
| Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                          |
| Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan         |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                |
| Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                   |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                           |
| Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan          |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                |
| Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan          |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                  |
| Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 6                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 6                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 6                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 7                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 7                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 7                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |
| SUB KEGIATAN 8                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 8                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 8                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    |
| Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                 |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu                                   |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                              |
| Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                             |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                        |
| Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |
| Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                        |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN 9                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 9                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 9                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| KEGIATAN 6                                   |
| SUB KEGIATAN 1                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 1                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 1                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |
| Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |
| Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                          |

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |
| Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 |
| Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                        |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>2                                        |
| SASARAN SUB<br>KEGIATAN 2                                |
| INDIKATOR SUB<br>KEGIATAN 2                              |
| SUB UNIT<br>KERJA<br>PENANGGUNG<br>JAWAB SUB<br>KEGIATAN |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>3                                        |
| SASARAN SUB<br>KEGIATAN 3                                |
| INDIKATOR SUB<br>KEGIATAN 3                              |
| SUB UNIT<br>KERJA<br>PENANGGUNG<br>JAWAB SUB<br>KEGIATAN |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>4                                        |
| SASARAN SUB<br>KEGIATAN 4                                |
| INDIKATOR SUB<br>KEGIATAN 4                              |
| SUB UNIT<br>KERJA<br>PENANGGUNG<br>JAWAB SUB<br>KEGIATAN |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Sub Keg. Pengadaan Mebel              |
| Tersedianya Mebel                     |
| Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan |
| Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian       |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya          |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                 |
| Jumlah Unit Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Disediakan |
| Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                            |

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Pengadaan Gedung<br>Kantor atau Bangunan Lainnya                        |
| Tersedianya Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan            |
| Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang Dipelihara<br>/ Direhabilitasi |
| Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                                                  |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| KEGIATAN 7                                   |
| SUB KEGIATAN 1                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 1                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 1                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |
| SUB KEGIATAN 2                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 2                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 2                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|            |
|------------|
| KEGIATAN 8 |
|------------|

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          |
| Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                       |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                           |
| Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                         |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |
| Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                           |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>1                                        |
| SASARAN SUB<br>KEGIATAN 1                                |
| INDIKATOR SUB<br>KEGIATAN 1                              |
| SUB UNIT<br>KERJA<br>PENANGGUNG<br>JAWAB SUB<br>KEGIATAN |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>2                                        |
| SASARAN SUB<br>KEGIATAN 2                                |
| INDIKATOR SUB<br>KEGIATAN 2                              |
| SUB UNIT<br>KERJA<br>PENANGGUNG<br>JAWAB SUB<br>KEGIATAN |

|                           |
|---------------------------|
| SUB KEGIATAN<br>3         |
| SASARAN SUB<br>KEGIATAN 3 |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak, dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan          |
| Jumlah Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya                       |
| Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian                                                                                                       |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Sub Keg. Pemeliharaan Mebel         |
| Terlaksananya Pemeliharaan<br>Mebel |
| Jumlah Mebel yang Dipelihara        |
| Kasubag Umum dan<br>Kepegawaian     |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Sub Keg. Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya      |
| Terlaksananya Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 3                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |
| SUB KEGIATAN 4                               |
| SASARAN SUB KEGIATAN 4                       |
| INDIKATOR SUB KEGIATAN 4                     |
| SUB UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                         |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                               |
| Sub Keg. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya    |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |
| Kasubag Umum dan Kepegawaian                                               |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada bab sebelumnya dilakukan melalui Strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Rumusan strategi pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 adalah :

1. Verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan
2. Meningkatkan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
3. Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala Kabupaten.
4. Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.
5. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.
6. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5.2 Arah Kebijakan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Arah kebijakan yang dirumuskan dapat berupa satu arah untuk 3 tahun kedepan, dapat pula

satu arah kebijakan dengan tahapan tahun per tahun. Berikut adalah arah kebijakan berdasarkan strategi yang dirumuskan :

1. Peningkatan Verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan
2. Peningkatan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek.
3. Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala Kabupaten.
4. Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.
6. Menyiapkan SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, inovatif, jujur dan berintegritas.

**Tabel. 12 (TC-26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone**

|                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VISI                                                                                                  | Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| MISI                                                                                                  | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| Tujuan                                                                                                | Sasaran                                                                                                 | Strategi                                                                                                                                                                                                          | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                  |
| Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftatan Penduduk dan Pencatatan Sipil                                 | 1. Optimalisasi Verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan<br><br>2. Meningkatkan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek. | 1. Peningkatan Verifikasi dan validasi data administrasi kependudukan<br><br>2. Peningkatan Kapabilitas penyelenggara administrasi kependudukan dalam penerbitan dokumen kependudukan melalui pelatihan/bimtek. |

|  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                   | <p>3. Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala Kabupaten.</p> <p>4. Peningkatan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.</p> <p>5. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.</p> | <p>3. Pelaksanaan Penyusunan Profil Kependudukan dan Penyajian data kependudukan skala Kabupaten.</p> <p>4. Meningkatkan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, OPD/Lembaga tentang adminduk dan pemanfaatan data kependudukan.</p> <p>5. Pemenuhan sarana dan prasarana serta pendukung pada penyajian, pemanfaatan dan pelaporan data sistem informasi administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi berbasis teknologi informasi.</p> |
|  | <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> | <p>1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. Menyiapkan SDM Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional, inovatif, jujur dan berintegritas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

**SERTA PENDANAAN**

**6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa terkait pengendalian kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah, rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah Daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Seiring dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka hal ini merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Serta turun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kepmendagri 050 – 5889 Tahun 2021 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 serta turunan dari Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan :

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk :

1. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
2. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
4. Mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
5. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2024-2026, terdapat 5 Program, 20 Kegiatan serta 82 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 3 (tiga) tahun untuk menyelenggarakan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026. Berikut disajikan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tahun 2024-2026 sebagaimana pada **Tabel TC-27** Berikut :

Tabel 13 (T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone

| Tujuan                                                                                                | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |                                                             |                   | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab   | Lokasi                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                       |                                                                            |      |                                                                           |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                  | 2025       |                  | 2026       |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   |                                                |                             |
|                                                                                                       |                                                                            |      |                                                                           |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp               | Target     | Rp               | Target     | Rp               | Target                                                      | Rp                |                                                |                             |
| (1)                                                                                                   | (2)                                                                        | (3)  | (4)                                                                       | (5)                                                                                        | (6)                                      | (9)                                           | (10)             | (11)       | (12)             | (11)       | (12)             | (13)                                                        | (14)              | (15)                                           | (16)                        |
|                                                                                                       |                                                                            | 2    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                                                                                            |                                          |                                               |                  |            |                  |            |                  |                                                             |                   |                                                |                             |
|                                                                                                       |                                                                            | 2 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BONE                         |                                                                                            |                                          |                                               | 4.897.829.905,00 |            | 5.144.720.000,00 |            | 5.415.490.000,00 |                                                             | 15.396.539.905,00 |                                                |                             |
| Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |      |                                                                           | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP                                                             | B (>60-70)                               | A (>80-90)                                    | 4.085.529.905    | A (>80-90) | 4.290.877.500    | A (>80-90) | 4.516.705.000    | A (>80-90)                                                  | 12.831.612.405    | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kec. Tanete Riaattang Barat |

| Tujuan | Sasaran<br>OPD<br>Sasaran<br>Program<br>Sasaran<br>Kegiatan<br>Sasaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                | Kode                          | Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan                                              | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Sasaran,<br>Program<br>(outcome) ,<br>Kegiatan dan<br>Sub.<br>Kegiatan<br>(output)                           | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |                                                                   |                | Unit Kerja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung-<br>Jawab | Lokasi                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             | 2024                                          |               | 2025   |               | 2026   |               | Kondisi Kinerja pada akhir<br>periode Renstra Perangkat<br>Daerah |                |                                                           |                                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                             | Target                                        | Rp            | Target | Rp            | Target | Rp            | Target                                                            | Rp             |                                                           |                                      |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                           | (4)                                                                                     | (5)                                                                                                                                             | (6)                                                         | (9)                                           | (10)          | (11)   | (12)          | (11)   | (12)          | (13)                                                              | (14)           | (15)                                                      | (16)                                 |
|        | Meningkatn<br>ya Capaian<br>Kinerja<br>Indikator<br>Program<br>Teknis<br>Dinas<br>Kependudu<br>kan dan<br>Pencatatan<br>Sipil                                                                                                                            | 2    12    01                 | PROGRAM<br>PENUNJAN<br>G URUSAN<br>PEMERINTA<br>HAN<br>DAERAH<br>KABUPATE<br>N / KOTA   | Persentase<br>Program<br>Teknis<br>Perangkat<br>Daerah<br>dengan Nilai<br>Capaian<br>Kinerja Tinggi<br>(Minimal 76%)                            | 100                                                         | 100                                           | 4.085.529.905 | 100    | 4.290.877.500 | 100    | 4.516.705.000 | 100                                                               | 12.831.612.405 | Sekretaris                                                | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Tersedianya<br>Dokumen<br>Perencanaa<br>n,<br>Penganggar<br>an, Evaluasi<br>dan<br>Pelaporan<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah<br>berdasarkan<br>jenis<br>dokumen<br>yang wajib<br>disusun<br>sesuai<br>ketentuan<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan | 2    12    01    2.01         | Perencanaa<br>n,<br>Penganggar<br>an, dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Persentase<br>Tingkat<br>Pemenuhan<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Penganggaran<br>, Evaluasi, dan<br>Pelaporan<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100                                                         | 100                                           | 53.000.000    | 100    | 55.000.000    | 100    | 60.000.000    | 100                                                               | 168.000.000    | Sekretaris                                                | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                                                                             | 2    12    01    2.01    0001 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                             | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah<br>( Dokumen )                                                                          | 7                                                           | 3                                             | 28.000.000    | 3      | 28.500.000    | 3      | 30.000.000    | 9                                                                 | 86.500.000     | Kasubag<br>Perencanaan                                    | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                                                                  | Kode              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output)                                                                                       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |        |            |        |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                          | 2024                                          |            | 2025   |            | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |                             |
|        |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                                          | Target                                        | Rp         | Target | Rp         | Target | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                         | (3)               | (4)                                                                         | (5)                                                                                                                                                                              | (6)                                      | (9)                                           | (10)       | (11)   | (12)       | (11)   | (12)       | (13)                                                        | (14)       | (15)                                         | (16)                        |
|        | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 12 01 2.01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 2                                        | 2                                             | 5.000.000  | 2      | 5.500.000  | 2      | 6.000.000  | 6                                                           | 16.500.000 | Kasubag Perencanaan                          | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 12 01 2.01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                                                                                       | 0                                        | 2                                             | 5.000.000  | 2      | 5.500.000  | 2      | 6.000.000  | 6                                                           | 16.500.000 | Kasubag Perencanaan                          | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 12 01 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 12                                       | 12                                            | 15.000.000 | 12     | 15.500.000 | 12     | 18.000.000 | 36                                                          | 48.500.000 | Kasubag Perencanaan                          | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                              | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                             |                                                                                                                              |     |               |               |                                                             |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi        |               |               |                             |                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                         |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                             | 2025                                                                                                                         |     | 2026          |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |                                              |               |               |               |                             |                             |
|        |                                                                                                                         |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                          | Target                                                                                                                       | Rp  | Target        | Rp            | Target                                                      | Rp            |                                              |               |               |               |                             |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                                     | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                         | (6)                                                                                                                          | (9) | (10)          | (11)          | (12)                                                        | (13)          | (14)                                         | (15)          | (16)          |               |                             |                             |
|        | Terselenggaranya Pelayanan administrasi keuangan pada perangkat daerah                                                  | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.02                                     | Administarsi Keuangan Perangkat Daerah        | Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | 100                                                                                                                          | 100 | 2.923.457.105 | 100           | 2.997.377.500                                               | 100           | 3.103.205.000                                | 100           | 8.962.539.605 | Sekretaris    | Kec. Tanete Riaattang Barat |                             |
|        | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                      | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.02                                     | 0001                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)                                                              | 31  | 31            | 2.880.457.105 | 31                                                          | 2.952.877.500 | 31                                           | 3.057.205.000 | 31            | 8.890.539.605 | Kasubag Keuangan            | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                      | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.02                                     | 0003                                          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)                                                | 0   | 12            | 5.000.000     | 12                                                          | 5.500.000     | 12                                           | 6.000.000     | 36            | 16.500.000    | Kasubag Keuangan            | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.02                                     | 0005                                          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | 0   | 1             | 18.000.000    | 1                                                           | 18.500.000    | 1                                            | 19.000.000    | 3             | 55.500.000    | Kasubag Keuangan            | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                                            | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                 |                                                                                                                                                                    |     |        |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi     |      |            |                              |                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                                                       |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                 | 2025                                                                                                                                                               |     | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |            |      |            |                              |                             |
|        |                                                                                                                                                       |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                              | Target                                                                                                                                                             | Rp  | Target | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |            |      |            |                              |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                   | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                             | (6)                                                                                                                                                                | (9) | (10)   | (11)       | (12)                                                        | (11)       | (12)                                         | (13)       | (14) | (15)       | (16)                         |                             |
|        | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.02                                     | 0007                                          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD ( Laporan ) | 2   | 2      | 20.000.000 | 2                                                           | 20.500.000 | 2                                            | 21.000.000 | 6    | 61.500.000 | Kasubag Keuangan             | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                               | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.03                                     |                                               | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Persentase Laporan Periodik Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah (%)                                                                                          | 100 | 100    | 10.000.000 | 100                                                         | 11.000.000 | 100                                          | 12.000.000 | 100  | 33.000.000 | Sekretaris                   | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.03                                     | 0001                                          | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)                                                                                                        | 0   | 2      | 5.000.000  | 2                                                           | 5.500.000  | 2                                            | 6.000.000  | 6    | 16.500.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                             | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.03                                     | 0006                                          | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)                                                                                               | 0   | 2      | 5.000.000  | 2                                                           | 5.500.000  | 2                                            | 6.000.000  | 6    | 16.500.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran<br>OPD<br>Sasaran<br>Program<br>Sasaran<br>Kegiatan<br>Sasaran<br>Sub<br>Kegiatan               | Kode                          | Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan                                      | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Sasaran,<br>Program<br>(outcome) ,<br>Kegiatan dan<br>Sub.<br>Kegiatan<br>(output) | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |        |            |        |             |                                                                   |             | Unit Kerja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung-<br>Jawab | Lokasi                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                                                                                                         |                               |                                                                                 |                                                                                                                       |                                                             | 2024                                          |            | 2025   |            | 2026   |             | Kondisi Kinerja pada akhir<br>periode Renstra Perangkat<br>Daerah |             |                                                           |                                      |
|        |                                                                                                         |                               |                                                                                 |                                                                                                                       |                                                             | Target                                        | Rp         | Target | Rp         | Target | Rp          | Target                                                            | Rp          |                                                           |                                      |
| (1)    | (2)                                                                                                     | (3)                           | (4)                                                                             | (5)                                                                                                                   | (6)                                                         | (9)                                           | (10)       | (11)   | (12)       | (11)   | (12)        | (13)                                                              | (14)        | (15)                                                      | (16)                                 |
|        | Terselenggara<br>nyanya<br>Pelayanan<br>Administras<br>i<br>Kepegawaia<br>n pada<br>Perangkat<br>Daerah | 2    12    01    2.05         | Administrasi<br>Kepegawaia<br>n Perangkat<br>Daerah                             | Persentase<br>Laporan<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>tersusun (%)                                      | 100                                                         | 100                                           | 90.000.000 | 100    | 93.000.000 | 100    | 108.000.000 | 100                                                               | 291.000.000 | Sekretaris                                                | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Tersedianya<br>Pakaian<br>Dinas<br>beserta<br>Atribut<br>Kelengkapan                                    | 2    12    01    2.05    0002 | Pengadaan<br>Pakaian<br>Dinas<br>beserta<br>Atribut<br>Kelengkapan<br>nya       | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>beserta Atribut<br>Kelengkapan<br>(Paket)                                            | 0                                                           | 65                                            | 20.000.000 | 65     | 20.500.000 | 65     | 30.000.000  | 65                                                                | 70.500.000  | Kasubag<br>Umum dan<br>Kepegawaian                        | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Terlaksanan<br>ya<br>Pendataan<br>dan<br>Pengolahan<br>Administراس<br>Kepegawaia<br>n                   | 2    12    01    2.05    0003 | Pendataan<br>dan<br>Pengolahan<br>Administراس<br>Kepegawaian                    | Jumlah Dokumen<br>Pendataan dan<br>Pengolahan<br>Administراس<br>Kepegawaian<br>(Dokumen)                              | 4                                                           | 12                                            | 10.000.000 | 12     | 11.000.000 | 12     | 15.000.000  | 36                                                                | 36.000.000  | Kasubag<br>Umum dan<br>Kepegawaian                        | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Terlaksanan<br>ya<br>Pendidikan<br>dan<br>Pelatihan<br>Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan<br>Fungsi    | 2    12    01    2.05    0009 | Pendidikan<br>dan<br>Pelatihan<br>Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan<br>Fungsi | Jumlah Pegawai<br>Berdasarkan<br>Tugas dan<br>Fungsi yang<br>Mengikuti<br>Pendidikan dan<br>Pelatihan<br>(Orang)      | 1                                                           | 1                                             | 30.000.000 | 1      | 31.000.000 | 1      | 32.000.000  | 3                                                                 | 93.000.000  | Kasubag<br>Umum dan<br>Kepegawaian                        | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Terlასanany<br>a Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                                     | 2    12    01    2.05    0010 | Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan                              | Jumlah Orang<br>yang<br>Mengikuti<br>Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>( Orang )                  | 0                                                           | 27                                            | 25.000.000 | 27     | 25.000.000 | 27     | 25.000.000  | 81                                                                | 75.000.000  | Kasubag<br>Umum dan<br>Kepegawaian                        | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                    |                                                                                                         |     |        |             |                                                             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi      |      |             |                              |                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------|-------------|------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                    | 2025                                                                                                    |     | 2026   |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                              |             |      |             |                              |                            |
|        |                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                 | Target                                                                                                  | Rp  | Target | Rp          | Target                                                      | Rp          |                                              |             |      |             |                              |                            |
| (1)    | (2)                                                                        | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                | (6)                                                                                                     | (9) | (10)   | (11)        | (12)                                                        | (11)        | (12)                                         | (13)        | (14) | (15)        | (16)                         |                            |
|        | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan   | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.05                                     | 0011                                          | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan         | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)          | 0   | 1      | 5.000.000   | 1                                                           | 5.500.000   | 1                                            | 6.000.000   | 3    | 16.500.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah         | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.06                                     |                                               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) | 100 | 100    | 220.000.000 | 100                                                         | 245.000.000 | 100                                          | 276.000.000 | 100  | 741.000.000 | Sekretaris                   | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.06                                     | 0001                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)              | 6   | 6      | 10.000.000  | 6                                                           | 11.000.000  | 6                                            | 12.000.000  | 18   | 33.000.000  | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.06                                     | 0002                                          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 12  | 12     | 50.000.000  | 12                                                          | 51.000.000  | 12                                           | 68.000.000  | 36   | 169.000.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan | Kode              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |        |            |        |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                            |                   |                                                          |                                                                                            |                                          | 2024                                          |            | 2025   |            | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |                            |
|        |                                                                            |                   |                                                          |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp         | Target | Rp         | Target | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |                            |
| (1)    | (2)                                                                        | (3)               | (4)                                                      | (5)                                                                                        | (6)                                      | (9)                                           | (10)       | (11)   | (12)       | (11)   | (12)       | (13)                                                        | (14)       | (15)                                         | (16)                       |
|        | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                         | 2 12 01 2.06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)                                | 6                                        | 6                                             | 10.000.000 | 6      | 10.500.000 | 6      | 11.000.000 | 18                                                          | 31.500.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian                 | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                          | 2 12 01 2.06 0004 | Penyediaan Peralatan Logistik Kantor                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                 | 2                                        | 6                                             | 10.000.000 | 6      | 10.500.000 | 6      | 11.000.000 | 18                                                          | 31.500.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian                 | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                 | 2 12 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                        | 12                                       | 12                                            | 10.000.000 | 12     | 10.500.000 | 12     | 11.000.000 | 36                                                          | 31.500.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian                 | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                  | 2 12 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)     | 12                                       | 12                                            | 10.000.000 | 12     | 10.500.000 | 12     | 11.000.000 | 36                                                          | 31.500.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian                 | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu                                    | 2 12 01 2.06 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)                                         | 0                                        | 12                                            | 10.000.000 | 12     | 10.500.000 | 12     | 11.000.000 | 36                                                          | 31.500.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian                 | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                  | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                        |                                                                                                                                         |     |        |             |                                                             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi      |      |               |                              |                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                             |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                        | 2025                                                                                                                                    |     | 2026   |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                              |             |      |               |                              |                             |
|        |                                                                                                             |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                     | Target                                                                                                                                  | Rp  | Target | Rp          | Target                                                      | Rp          |                                              |             |      |               |                              |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                         | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                    | (6)                                                                                                                                     | (9) | (10)   | (11)        | (12)                                                        | (13)        | (14)                                         | (15)        | (16) |               |                              |                             |
|        | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                          | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.06                                     | 0009                                          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                           | 660 | 300    | 100.000.000 | 300                                                         | 120.000.000 | 300                                          | 130.000.000 | 300  | 350.000.000   | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                        | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.06                                     | 0011                                          | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)                                         | n/a | 1      | 10.000.000  | 1                                                           | 10.500.000  | 1                                            | 11.000.000  | 3    | 31.500.000    | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.07                                     |                                               | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%) | 100 | 100    | 310.000.000 | 100                                                         | 397.500.000 | 100                                          | 453.500.000 | 100  | 1.161.000.000 | Sekretaris                   | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                         | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.07                                     | 0001                                          | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)                                              | 0   | 1      | 250.000.000 | 1                                                           | 334.500.000 | 1                                            | 389.000.000 | 3    | 973.500.000   | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                   | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                         |                                                                                                  |     |        |             |                                                             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi      |      |               |                              |                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                              |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                         | 2025                                                                                             |     | 2026   |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                              |             |      |               |                              |                            |
|        |                                                                                              |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                      | Target                                                                                           | Rp  | Target | Rp          | Target                                                      | Rp          |                                              |             |      |               |                              |                            |
| (1)    | (2)                                                                                          | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                     | (6)                                                                                              | (9) | (10)   | (11)        | (12)                                                        | (13)        | (14)                                         | (15)        | (16) |               |                              |                            |
|        | Tersedianya Mebel                                                                            | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.07                                     | 0005                                          | Pengadaan Mebel                                         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                        | 10  | 10     | 20.000.000  | 10                                                          | 21.000.000  | 10                                           | 21.500.000  | 30   | 62.500.000    | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                      | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.07                                     | 0006                                          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 7   | 15     | 20.000.000  | 15                                                          | 21.000.000  | 15                                           | 21.500.000  | 45   | 62.500.000    | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                              | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.07                                     | 0009                                          | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 0   | 1      | 20.000.000  | 1                                                           | 21.000.000  | 1                                            | 21.500.000  | 3    | 62.500.000    | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan pada perangkat Daerah | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.08                                     |                                               | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)                            | 100 | 100    | 434.072.800 | 100                                                         | 445.000.000 | 100                                          | 455.000.000 | 100  | 1.334.072.800 | Sekretaris                   | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                     | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.08                                     | 0002                                          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12  | 12     | 100.000.000 | 12                                                          | 105.000.000 | 12                                           | 110.000.000 | 36   | 315.000.000   | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                              | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                      |                                                                                                                                            |     |        |             |                                                             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi      |      |               |                              |                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------|---------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                         |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                                      | 2025                                                                                                                                       |     | 2026   |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                              |             |      |               |                              |                             |
|        |                                                                                                                         |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                                   | Target                                                                                                                                     | Rp  | Target | Rp          | Target                                                      | Rp          |                                              |             |      |               |                              |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                                     | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                                  | (6)                                                                                                                                        | (9) | (10)   | (11)        | (12)                                                        | (11)        | (12)                                         | (13)        | (14) | (15)          | (16)                         |                             |
|        | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                  | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.08                                     | 0004                                          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                                             | 12  | 12     | 334.072.800 | 12                                                          | 340.000.000 | 12                                           | 345.000.000 | 36   | 1.019.072.800 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan dalam Kondisi Baik pada Perangkat Daerah                            | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.09                                     |                                               | Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%) | 100 | 100    | 45.000.000  | 100                                                         | 47.000.000  | 100                                          | 49.000.000  | 100  | 141.000.000   | Sekretaris                   | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Tersedianya Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.09                                     | 0002                                          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)                              | 11  | 15     | 30.000.000  | 15                                                          | 30.500.000  | 15                                           | 31.000.000  | 45   | 91.500.000    | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Pemeliharaan n Mebel                                                                                      | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.09                                     | 0005                                          | Pemeliharaan n Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                                                                  | 3   | 7      | 5.000.000   | 7                                                           | 5.500.000   | 7                                            | 6.000.000   | 21   | 16.500.000    | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                |                                                                                                                                      |                    |              |                                |                                                             |                                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi                         |              |                                    |                                                |                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                     | 2024                                          |                                                                | 2025                                                                                                                                 |                    | 2026         |                                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                                |                                              |                                |              |                                    |                                                |                             |
|        |                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                     | Target                                        | Rp                                                             | Target                                                                                                                               | Rp                 | Target       | Rp                             | Target                                                      | Rp                             |                                              |                                |              |                                    |                                                |                             |
| (1)    | (2)                                                                        | (3)  |                                   |                                                                                            |                                     | (4)                                           | (5)                                                            | (6)                                                                                                                                  | (9)                | (10)         | (11)                           | (12)                                                        | (13)                           | (14)                                         | (15)                           | (16)         |                                    |                                                |                             |
|        | Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.09                                | 0006                                          | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                                            | 27                 | 1            | 5.000.000                      | 1                                                           | 5.500.000                      | 1                                            | 6.000.000                      | 3            | 16.500.000                         | Kasubag Umum dan Kepegawaian                   | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2    | 12                                | 01                                                                                         | 2.09                                | 0009                                          | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Unit)                                                    | 1                  | 2            | 5.000.000                      | 2                                                           | 5.500.000                      | 2                                            | 6.000.000                      | 6            | 16.500.000                         | Kasubag Umum dan Kepegawaian                   | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil    |      |                                   |                                                                                            |                                     |                                               |                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat ( Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil )                                                              | n/a                | 80           | 812.300.000,00                 | 81                                                          | 853.842.500,00                 | 82                                           | 898.785.000,00                 | 82           | 2.564.927.500,00                   | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil    | 2    | 12                                | 02                                                                                         |                                     |                                               | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                   | Persentase Perekaman KTP Elektronik (%)<br><br>Persentase Penerbitan anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%) | 95,35<br><br>37,69 | 96<br><br>40 | 675.000.000<br><br>415.000.000 | 96<br><br>96                                                | 709.500.000<br><br>444.500.000 | 96<br><br>96                                 | 746.840.000<br><br>476.840.000 | 98<br><br>96 | 2.131.340.000<br><br>1.336.340.000 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Penerbitan Dokumen Kependudukan                              | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.01                                |                                               | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                 | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan                                                                                          | 100                | 96           | 415.000.000                    | 96                                                          | 444.500.000                    | 96                                           | 476.840.000                    | 96           | 1.336.340.000                      | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan               | Kode              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output)                | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |             |        |             |        |             |                                                             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                          |                   |                                                                            |                                                                                                           |                                          | 2024                                          |             | 2025   |             | 2026   |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                              |                             |
|        |                                                                                          |                   |                                                                            |                                                                                                           |                                          | Target                                        | Rp          | Target | Rp          | Target | Rp          | Target                                                      | Rp          |                                              |                             |
| (1)    | (2)                                                                                      | (3)               | (4)                                                                        | (5)                                                                                                       | (6)                                      | (9)                                           | (10)        | (11)   | (12)        | (11)   | (12)        | (13)                                                        | (14)        | (15)                                         | (16)                        |
|        | Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan         | 2 12 02 2.01 0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan       | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)       | 18.961                                   | 50                                            | 25.000.000  | 50     | 30.000.000  | 50     | 35.000.000  | 150                                                         | 90.000.000  | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 2 12 02 2.01 0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen) | -                                        | 20000                                         | 30.000.000  | 20000  | 30.000.000  | 20000  | 35.000.000  | 60000                                                       | 95.000.000  | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                                  | 2 12 02 2.01 0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk                                  | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)              | -                                        | 7500                                          | 30.000.000  | 7500   | 30.000.000  | 7500   | 30.000.000  | 22500                                                       | 90.000.000  | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                              | 2 12 02 2.01 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                 | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)                                 | 12                                       | 12                                            | 225.000.000 | 12     | 249.500.000 | 12     | 265.000.000 | 36                                                          | 739.500.000 | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                           | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                        |                                                                                                                 |     |        |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi     |       |             |                                              |                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                      |      |                                   |                                                                                            |                                     | 2024                                          |                                                                                        | 2025                                                                                                            |     | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |            |       |             |                                              |                             |
|        |                                                                                                      |      |                                   |                                                                                            |                                     | Target                                        | Rp                                                                                     | Target                                                                                                          | Rp  | Target | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |            |       |             |                                              |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                  | (3)  |                                   |                                                                                            |                                     | (4)                                           | (5)                                                                                    | (6)                                                                                                             | (9) | (10)   | (11)       | (12)                                                        | (11)       | (12)                                         | (13)       | (14)  | (15)        | (16)                                         |                             |
|        | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.01                                | 0005                                          | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen) | 110 | 20000  | 35.000.000 | 20000                                                       | 35.000.000 | 20000                                        | 35.000.000 | 60000 | 105.000.000 | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                       | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.01                                | 0006                                          | Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                       | Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan (Laporan)                                                 | -   | 7500   | 20.000.000 | 7500                                                        | 20.000.000 | 7500                                         | 26.840.000 | 22500 | 66.840.000  | Sub Koordinator Pendataan Penduduk           | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                         | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.01                                | 0007                                          | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan                         | Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)                         | -   | 12     | 50.000.000 | 12                                                          | 50.000.000 | 12                                           | 50.000.000 | 36    | 150.000.000 | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terselenggaranya Penataan Pendaftaran Pendudukan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Bone          | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.02                                |                                               | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                          | Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk(%)                                                                     | 90  | 90     | 70.000.000 | 90                                                          | 70.000.000 | 90                                           | 70.000.000 | 90    | 210.000.000 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                                     | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |     |        |             |                                                             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi      |      |             |                                              |                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                                                  | 2025                                                                                                                                                                             |     | 2026   |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                              |             |      |             |                                              |                            |
|        |                                                                                                                                                |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                                               | Target                                                                                                                                                                           | Rp  | Target | Rp          | Target                                                      | Rp          |                                              |             |      |             |                                              |                            |
| (1)    | (2)                                                                                                                                            | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                                              | (6)                                                                                                                                                                              | (9) | (10)   | (11)        | (12)                                                        | (11)        | (12)                                         | (13)        | (14) | (15)        | (16)                                         |                            |
|        | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan                | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.02                                     | 0002                                          | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan    | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)                               | 3   | 7      | 70.000.000  | 7                                                           | 70.000.000  | 7                                            | 70.000.000  | 21   | 210.000.000 | Sub Koordinator Pendataan Penduduk           | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk masyarakat Kabupaten Bone                                                                                | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.03                                     |                                               | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                             | Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (%)                                                                                                                              | 90  | 90     | 140.000.000 | 90                                                          | 145.000.000 | 90                                           | 150.000.000 | 90   | 435.000.000 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.03                                     | 0001                                          | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | -   | 4      | 20.000.000  | 4                                                           | 20.000.000  | 4                                            | 20.000.000  | 12   | 60.000.000  | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                               |                                                                                                                             |                 |              |             |                                                             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi      |              |             |                                              |                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                               | 2025                                                                                                                        |                 | 2026         |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                              |             |              |             |                                              |                            |
|        |                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                            | Target                                                                                                                      | Rp              | Target       | Rp          | Target                                                      | Rp          |                                              |             |              |             |                                              |                            |
| (1)    | (2)                                                                        | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                           | (6)                                                                                                                         | (9)             | (10)         | (11)        | (12)                                                        | (11)        | (12)                                         | (13)        | (14)         | (15)        | (16)                                         |                            |
|        | Terfasilitasi nya Pendaftaran Penduduk                                     | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.03                                     | 0003                                          | Fasilitasi Pendaftaran Penduduk                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)                                                              | -               | 12           | 20.000.000  | 12                                                          | 20.000.000  | 12                                           | 20.000.000  | 36           | 60.000.000  | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersosialisasi nya Pendaftaran Penduduk                                    | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.03                                     | 0005                                          | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk                              | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)                                                             | -               | 1            | 100.000.000 | 1                                                           | 105.000.000 | 1                                            | 110.000.000 | 3            | 315.000.000 | Sub Koordinator Pendataan Penduduk           | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk              | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.04                                     |                                               | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (%)                                                | -               | 90           | 50.000.000  | 90                                                          | 50.000.000  | 90                                           | 50.000.000  | 90           | 150.000.000 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk                | 2    | 12                                | 02                                                                                         | 2.04                                     | 0003                                          | Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk                         | Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (laporan)                                                      | -               | 5            | 50.000.000  | 5                                                           | 50.000.000  | 5                                            | 50.000.000  | 15           | 150.000.000 | Sub Koordinator Identitas Kependudukan       | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Meningkatnya Penerbitan Akta Pencatatan Sipil                              | 2    | 12                                | 03                                                                                         |                                          |                                               | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                      | - Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (%)<br><br>- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak Usia 0-18 tahun (%) | 90<br><br>96,27 | 90<br><br>97 | 82.300.000  | 90<br><br>97                                                | 86.527.500  | 90<br><br>97                                 | 91.085.000  | 94<br><br>99 | 259.912.500 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil     | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                      | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                   |                                                                                                                  |      |            |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi     |             |                                          |                                                                     |                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                 |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                   | 2025                                                                                                             |      | 2026       |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |            |             |                                          |                                                                     |                             |
|        |                                                                                                 |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                | Target                                                                                                           | Rp   | Target     | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |            |             |                                          |                                                                     |                             |
| (1)    | (2)                                                                                             | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                               | (6)                                                                                                              | (9)  | (10)       | (11)       | (12)                                                        | (11)       | (12)                                         | (13)       | (14)        | (15)                                     | (16)                                                                |                             |
|        | Akta Pencatatan Sipil                                                                           | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.01                                     | Pelayanan Pencatatan Sipil                    | Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (%)                                   | 100                                                                                                              | 100  | 35.000.000 | 100        | 39.227.500                                                  | 100        | 43.785.000                                   | 100        | 118.012.500 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Kec. Tanete Riaattang Barat                                         |                             |
|        | Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.01                                     | 0001                                          | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen) | 1214 | 1300       | 5.000.000  | 1300                                                        | 5.000.000  | 1300                                         | 7.500.000  | 3900        | 17.500.000                               | Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil                                                         | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.01                                     | 0002                                          | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                      | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)                                                      | 280  | 300        | 15.000.000 | 300                                                         | 19.227.500 | 300                                          | 15.000.000 | 900         | 49.227.500                               | Sub Koordinator Kelahiran                                           | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil                       | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.01                                     | 0003                                          | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)                       | 1    | 1          | 5.000.000  | 1                                                           | 5.000.000  | 1                                            | 7.500.000  | 3           | 17.500.000                               | Sub Koordinator Kelahiran                                           | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                                                 | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |     |        |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi     |      |            |                                          |                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------|------------|------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                                                                   | 2025                                                                                                                                                                          |     | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |            |      |            |                                          |                            |
|        |                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                                                                | Target                                                                                                                                                                        | Rp  | Target | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |            |      |            |                                          |                            |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                        | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                                                               | (6)                                                                                                                                                                           | (9) | (10)   | (11)       | (12)                                                        | (11)       | (12)                                         | (13)       | (14) | (15)       | (16)                                     |                            |
|        | Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.01                                     | 0004                                          | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraa n Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen) | 5   | 1      | 5.000.000  | 1                                                           | 5.000.000  | 1                                            | 8.785.000  | 3    | 18.785.000 | Sub Koordinator Kelahiran                | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan                                | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.01                                     | 0005                                          | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan                         | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)                                  | 3   | 20     | 5.000.000  | 20                                                          | 5.000.000  | 20                                           | 5.000.000  | 60   | 15.000.000 | Sub Koordinator Kelahiran                | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengadaan Dokumen Kependudukan                                                     | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.02                                     |                                               | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                                                  | Persentase Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pengadaan Dokumen Kependudukan (%)                                                | 90  | 90     | 30.000.000 | 90                                                          | 30.000.000 | 90                                           | 30.000.000 | 90   | 90.000.000 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |           |                                                             |           | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi    |      |            |                                           |                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                                                                                                                                                      | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2026   |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |           |                                              |           |      |            |                                           |                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                                                                                                                                                   | Target                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp  | Target | Rp        | Target                                                      | Rp        |                                              |           |      |            |                                           |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                  | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                 | (9) | (10)   | (11)      | (12)                                                        | (11)      | (12)                                         | (13)      | (14) | (15)       | (16)                                      |                             |
|        | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.02                                     | 0001                                          | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan) | 24  | 24     | 5.000.000 | 24                                                          | 5.000.000 | 24                                           | 5.000.000 | 72   | 15.000.000 | Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian | Kec. Tanete Riaattang Barat |

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                 | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |           |                                                             |           | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi    |      |            |                                           |                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2026   |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |           |                                              |           |      |            |                                           |                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rp  | Target | Rp        | Target                                                      | Rp        |                                              |           |      |            |                                           |                            |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                          | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (9) | (10)   | (11)      | (12)                                                        | (11)      | (12)                                         | (13)      | (14) | (15)       | (16)                                      |                            |
|        | Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.02                                     | 0002                                          | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan) | 30  | 30     | 5.000.000 | 30                                                          | 5.000.000 | 30                                           | 5.000.000 | 90   | 15.000.000 | Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian | Kec. Tanete Riaatang Barat |

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                                 | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |     |        |           |                                                             |           | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi    |      |            |                                                                     |                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                                              | 2025                                                                                                                                                        |     | 2026   |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |           |                                              |           |      |            |                                                                     |                             |
|        |                                                                                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                                           | Target                                                                                                                                                      | Rp  | Target | Rp        | Target                                                      | Rp        |                                              |           |      |            |                                                                     |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                                                        | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                                          | (6)                                                                                                                                                         | (9) | (10)   | (11)      | (12)                                                        | (11)      | (12)                                         | (13)      | (14) | (15)       | (16)                                                                |                             |
|        | Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.02                                     | 0003                                          | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan) | 30  | 30     | 5.000.000 | 30                                                          | 5.000.000 | 30                                           | 5.000.000 | 90   | 15.000.000 | Sub Koordinator Kelahiran                                           | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil          | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.02                                     | 0004                                          | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil          | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)          | 30  | 30     | 5.000.000 | 30                                                          | 5.000.000 | 30                                           | 5.000.000 | 90   | 15.000.000 | Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                     | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                  |                                                                                                                           |     |        |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi     |      |            |                                                                     |                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                  | 2025                                                                                                                      |     | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |            |      |            |                                                                     |                             |
|        |                                                                                                                |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                               | Target                                                                                                                    | Rp  | Target | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |            |      |            |                                                                     |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                            | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                              | (6)                                                                                                                       | (9) | (10)   | (11)       | (12)                                                        | (11)       | (12)                                         | (13)       | (14) | (15)       | (16)                                                                |                             |
|        | Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil        | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.02                                     | 0009                                          | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil        | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)  | -   | 3      | 5.000.000  | 3                                                           | 5.000.000  | 3                                            | 5.000.000  | 9    | 15.000.000 | Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.02                                     | 0011                                          | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan) | -   | 1      | 5.000.000  | 1                                                           | 5.000.000  | 1                                            | 5.000.000  | 3    | 15.000.000 | Sub Koordinator Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                      | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.03                                     |                                               | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                        | Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (%)                                      | 90  | 90     | 17.300.000 | 90                                                          | 17.300.000 | 90                                           | 17.300.000 | 90   | 51.900.000 | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil                            | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                           | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |     |        |           |                                                             |           | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi    |      |            |                                           |                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|------|------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                                      |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                                        | 2025                                                                                                                                                  |     | 2026   |           | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |           |                                              |           |      |            |                                           |                            |
|        |                                                                                                                                      |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                                     | Target                                                                                                                                                | Rp  | Target | Rp        | Target                                                      | Rp        |                                              |           |      |            |                                           |                            |
| (1)    | (2)                                                                                                                                  | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                                    | (6)                                                                                                                                                   | (9) | (10)   | (11)      | (12)                                                        | (11)      | (12)                                         | (13)      | (14) | (15)       | (16)                                      |                            |
|        | Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.03                                     | 0001                                          | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen) | -   | 1      | 5.000.000 | 1                                                           | 5.000.000 | 1                                            | 5.000.000 | 3    | 15.000.000 | Sub Koordinator Kelahiran                 | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil                                                                                          | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.03                                     | 0002                                          | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan (Laporan)                                                                          | -   | 1      | 5.000.000 | 1                                                           | 5.000.000 | 1                                            | 5.000.000 | 3    | 15.000.000 | Sub Koordinator Kelahiran                 | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                              | 2    | 12                                | 03                                                                                         | 2.03                                     | 0004                                          | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)                                                                              | -   | 2      | 7.300.000 | 2                                                           | 7.300.000 | 2                                            | 7.300.000 | 6    | 21.900.000 | Sub Koordinator Perkawinan dan Perceraian | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                          | Kode      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output)                                  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |        |            |        |            |                                                             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab                                                                                                                                             | Lokasi                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|        |                                                                                                                     |           |                                                                                   |                                                                                                                             |                                          | 2024                                          |            | 2025   |            | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |             |                                                                                                                                                                                          |                             |
|        |                                                                                                                     |           |                                                                                   |                                                                                                                             |                                          | Target                                        | Rp         | Target | Rp         | Target | Rp         | Target                                                      | Rp          |                                                                                                                                                                                          |                             |
| (1)    | (2)                                                                                                                 | (3)       | (4)                                                                               | (5)                                                                                                                         | (6)                                      | (9)                                           | (10)       | (11)   | (12)       | (11)   | (12)       | (13)                                                        | (14)        | (15)                                                                                                                                                                                     | (16)                        |
|        | Meningkatnya Pengolahan Data Kependudukan, Kerja sama dan Pemanfaatan Data dalam bentuk Pelaporan Data Kependudukan | 21204     | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                           | Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (%)                              | 90                                       | 100                                           | 32.500.000 | 100    | 34.165.000 | 100    | 35.965.000 | 100                                                         | 102.630.000 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kec. Tanete Riaattang Barat |
|        | Pengolahan dan Penyajian Data, Kerja Sama dan Pemanfataan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil                    | 212042.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Cakupan Dokumen/Laporan Pengolahan dan Penyajian Data dan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%) | 90                                       | 100                                           | 10.000.000 | 100    | 11.665.000 | 100    | 13.465.000 | 100                                                         | 35.130.000  | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kec. Tanete Riaattang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                 |                                                                                                                                          |     |        |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi     |      |            |                                                                                                                                                                                          |                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                     | 2024                                          |                                                                 | 2025                                                                                                                                     |     | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |            |      |            |                                                                                                                                                                                          |                            |
|        |                                                                            |      |                                   |                                                                                            |                                     | Target                                        | Rp                                                              | Target                                                                                                                                   | Rp  | Target | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |            |      |            |                                                                                                                                                                                          |                            |
| (1)    | (2)                                                                        | (3)  |                                   |                                                                                            |                                     | (4)                                           | (5)                                                             | (6)                                                                                                                                      | (9) | (10)   | (11)       | (12)                                                        | (11)       | (12)                                         | (13)       | (14) | (15)       | (16)                                                                                                                                                                                     |                            |
|        | Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                   | 2    | 12                                | 04                                                                                         | 2.01                                | 0001                                          | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                      | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)                                                                     | 12  | 12     | 5.000.000  | 12                                                          | 6.665.000  | 12                                           | 7.000.000  | 36   | 18.665.000 | Sub koordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                                                                               | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                     | 2    | 12                                | 04                                                                                         | 2.01                                | 0002                                          | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan                         | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)                                                                        | 15  | 5      | 5.000.000  | 5                                                           | 5.000.000  | 5                                            | 6.465.000  | 15   | 16.465.000 | Sub.Koordinator Kerjasama                                                                                                                                                                | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil                       | 2    | 12                                | 04                                                                                         | 2.03                                |                                               | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam bentuk rekap realisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan (%) | 90  | 100    | 22.500.000 | 100                                                         | 22.500.000 | 100                                          | 22.500.000 | 100  | 67.500.000 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran OPD<br>Sasaran Program<br>Sasaran Kegiatan<br>Sasaran Sub Kegiatan                                                                                      | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) , Kegiatan dan Sub. Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |     |        |            |                                                             |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-Jawab | Lokasi     |      |            |                                                                                         |                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                                                                                                                                                 |      |                                   |                                                                                            |                                          | 2024                                          |                                                                                                                                                   | 2025                                                                                                                                                                             |     | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |            |                                              |            |      |            |                                                                                         |                            |
|        |                                                                                                                                                                 |      |                                   |                                                                                            |                                          | Target                                        | Rp                                                                                                                                                | Target                                                                                                                                                                           | Rp  | Target | Rp         | Target                                                      | Rp         |                                              |            |      |            |                                                                                         |                            |
| (1)    | (2)                                                                                                                                                             | (3)  |                                   |                                                                                            |                                          | (4)                                           | (5)                                                                                                                                               | (6)                                                                                                                                                                              | (9) | (10)   | (11)       | (12)                                                        | (11)       | (12)                                         | (13)       | (14) | (15)       | (16)                                                                                    |                            |
|        | Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 2    | 12                                | 04                                                                                         | 2.03                                     | 0001                                          | Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) | 0   | 12     | 5.000.000  | 12                                                          | 5.000.000  | 12                                           | 5.000.000  | 36   | 15.000.000 | Sub Koordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                     | 2    | 12                                | 04                                                                                         | 2.03                                     | 0004                                          | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)                                                                                                           | 10  | 5      | 5.000.000  | 5                                                           | 5.000.000  | 5                                            | 5.000.000  | 15   | 15.000.000 | Sub Koordinator Pemanfaatan Dokumen Kependudukan                                        | Kec. Tanete Riaatang Barat |
|        | Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                               | 2    | 12                                | 04                                                                                         | 2.03                                     | 0005                                          | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)                                                                                       | 27  | 1      | 12.500.000 | 1                                                           | 12.500.000 | 1                                            | 12.500.000 | 3    | 37.500.000 | Sub Koordinator Pemanfaatan Dokumen Kependudukan                                        | Kec. Tanete Riaatang Barat |

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran<br>OPD<br>Sasaran<br>Program<br>Sasaran<br>Kegiatan<br>Sasaran<br>Sub<br>Kegiatan                                      | Kode          | Program /<br>Kegiatan /<br>Sub<br>Kegiatan                                                                        | Indikator<br>Kinerja<br>Tujuan,<br>Sasaran,<br>Program<br>(outcome) ,<br>Kegiatan dan<br>Sub.<br>Kegiatan<br>(output)               | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |        |            |        |            |                                                                   |            | Unit Kerja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Penanggung-<br>Jawab                                                    | Lokasi                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|        |                                                                                                                                |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             | 2024                                          |            | 2025   |            | 2026   |            | Kondisi Kinerja pada akhir<br>periode Renstra Perangkat<br>Daerah |            |                                                                                                              |                                      |
|        |                                                                                                                                |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             | Target                                        | Rp         | Target | Rp         | Target | Rp         | Target                                                            | Rp         |                                                                                                              |                                      |
| (1)    | (2)                                                                                                                            | (3)           | (4)                                                                                                               | (5)                                                                                                                                 | (6)                                                         | (9)                                           | (10)       | (11)   | (12)       | (11)   | (12)       | (13)                                                              | (14)       | (15)                                                                                                         | (16)                                 |
|        | Meningkatn<br>ya<br>Pengelolaan<br>Data<br>Kependudu<br>kan dalam<br>bentuk buku<br>Profil<br>Kependudu<br>kan Data<br>Agregat | 21205         | PROGRAM<br>PENGELOL<br>AAN<br>PROFIL<br>KEPENDUD<br>UKAN                                                          | Persentase<br>Ketersediaan<br>Data dan Profil<br>Kependuduka<br>n (%)                                                               | 100                                                         | 100                                           | 22.500.000 | 100    | 23.650.000 | 100    | 24.895.000 | 100                                                               | 71.045.000 | Kepala<br>Bidang<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependuduka<br>n                             | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Data<br>Kependudu<br>kan dalam<br>bentuk buku<br>profil dan<br>data<br>Agregat                                                 | 212052.01     | Penyusunan<br>Profil<br>Kependuduk<br>an                                                                          | Persentase<br>Buku Profil<br>Kependuduka<br>n yang<br>diterbitkan (%)                                                               | 100                                                         | 100                                           | 22.500.000 | 100    | 23.650.000 | 100    | 24.895.000 | 100                                                               | 71.045.000 | Kepala<br>Bidang<br>Pengelolaan<br>Informasi<br>Administrasi<br>Kependuduka<br>n                             | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Tersedianya<br>Data<br>Kependuduk<br>an<br>Kabupaten/K<br>ota                                                                  | 212052.010001 | Penyediaan<br>Data<br>Kependuduk<br>an<br>Kabupaten/K<br>ota                                                      | Jumlah Data<br>Kependudukan<br>Kabupaten/Kot<br>a (Dokumen)                                                                         | 12                                                          | 100                                           | 10.000.000 | 100    | 11.150.000 | 100    | 12.395.000 | 300                                                               | 33.545.000 | Sub<br>Koordinator<br>Pengolahan<br>dan Penyajian<br>Data<br>Kependudukan                                    | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |
|        | Tersusunnya<br>Profil Data<br>Perkembang<br>an dan<br>Proyeksi<br>Kependuduk<br>an serta<br>Kebutuhan<br>yang Lain             | 212052.010002 | Penyusunan<br>Profil Data<br>Perkembang<br>an dan<br>Proyeksi<br>Kependuduk<br>an serta<br>Kebutuhan<br>yang lain | Jumlah<br>Dokumen Profil<br>Data<br>Perkembangan<br>dan<br>Proyeksi<br>Kependudukan<br>serta<br>Kebutuhan<br>yang Lain<br>(Dokumen) | 100                                                         | 100                                           | 12.500.000 | 100    | 12.500.000 | 100    | 12.500.000 | 300                                                               | 37.500.000 | Sub<br>Koordinator<br>Tata Kelola<br>dan Sumber<br>Daya Manusia<br>Teknologi,<br>Informasi dan<br>Komunikasi | Kec.<br>Tanete<br>Riaattang<br>Barat |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone. Adapun kinerja yang akan dicapai dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 didasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang terkolaborasi pada indikator urusan pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017, untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum ditetapkan/diatur oleh masing-masing Kementerian terkait. Berikut disajikan indikator yang akan dicapai sebagaimana pada tabel **T-C.28**. sebagai berikut :

Tabel 14 (T-C.28)  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

| NO                            | Indikator                                                          | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------------------------------------|
|                               |                                                                    |        |                                         | 2024                        | 2025  | 2026  |                                          |
| (1)                           | (2)                                                                | (3)    | (4)                                     | (5)                         | (6)   | (7)   | (8)                                      |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) |                                                                    |        |                                         |                             |       |       |                                          |
| 1                             | Indeks Pelayanan Publik (Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil) | -      | n/a                                     | 80,00                       | 81,00 | 82,00 | 82,00                                    |
| 2                             | Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP                                     | %      | 80,56                                   | 81,00                       | 81,25 | 81,50 | 81,50                                    |

| NO                            | Indikator                                                                                     | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|------------------------------------------|
|                               |                                                                                               |        |                                         | 2024                        | 2025   | 2026   |                                          |
| (1)                           | (2)                                                                                           | (3)    | (4)                                     | (5)                         | (6)    | (7)    | (8)                                      |
| INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) |                                                                                               |        |                                         |                             |        |        |                                          |
| 1                             | Cakupan Perekaman KTP Elektronik                                                              | %      | 95,35                                   | 96,00                       | 97,00  | 98,00  | 98,00                                    |
| 2                             | Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) | %      | 37,69                                   | 40,00                       | 45,00  | 50,00  | 50,00                                    |
| 3                             | Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil                                                      | %      | 90,00                                   | 90,00                       | 92,00  | 94,00  | 94,00                                    |
| 4                             | Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi Anak Usia 0-18 tahun                               | %      | 96,27                                   | 97,00                       | 98,00  | 99,00  | 99,00                                    |
| 5                             | Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama    | %      | 90,00                                   | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00                                   |
| 6                             | Persentase Ketersediaan Data dan Profil Kependudukan                                          | %      | 100,00                                  | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00                                   |

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 3 (tiga) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.